



# Stronika Direktorat Milai Sejarah 2005-2009

DIREKTORAT NILAI SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2010





## 5 th Kronika

Direktorat Milai Sejarah 2005-2009

DIREKTORAT NILAI SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2010 Pengarah:

Drs. Shabri Aliaman

Penulis:

M. Sanggupri Bochari, M.Hum.

Dra. Espita Riama

Lia Supardianik, S.Sos.

Editor:

Prof. Dr. Susanto Zuhdi

Cetakan Pertama, 2010

Direktorat Nilai Sejarah

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Komplek Kemdiknas Gedung E Lantai 8

Jl. Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270

Telp./ Fax: (021) 5725519

 ${\bf Email:nilaisejarah\_budpar@yahoo.co.id}$ 

Website: www.nilaisejarah.budpar.go.id

Sumber Cover:

Kalender Direktorat Nilai Sejarah Tahun 2011

(Sumber: ANRI)

#### PENGANTAR PENULIS

Hanya dengan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Buku "Kronika 5 th Direktorat Nilai Sejarah 2005-2009" dapat terselesaikan. Buku ini berisikan data-data kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Nilai Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata selama kurun waktu lima tahun tersebut.

Pemilihan judul dengan menggunakan kata "Kronika" menjelaskan bahwa buku ini menguraikan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh Direktorat Nilai Sejarah, selama periode 5 tahun dari tahun 2005 hingga 2009. Periode ini menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) I, dan tahun mulai dibentuknya Direktorat Nilai Sejarah.

Penulis menyadari bahwa data-data yang digunakan sebagai dasar penyusunan buku ini belum lengkap. Untuk itu penulis senantiasa mengumpulkan data-data tambahan dari berbagai pihak untuk melengkapi data yang sudah ada demi kesempurnaan buku pada cetakan berikutnya. Kami haturkan terima kasih kepada Direktur Nilai Sejarah dan editor, serta pihak-pihak yang telah mendorong kami untuk menyelesaikan buku ini.

Akhir kata, semoga buku yang berisi "Kronik" Direktorat Nilai Sejarah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.

Tim Penulis

#### SAMBUTAN DIREKTUR NILAI SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas selesainya buku Kronika 5 tahun Direktorat Nilai Sejarah 2005-2009. Buku ini menguraikan data-data hasil aktivitas yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Nilai Sejarah tahun 2005-2009. Sampai selesainya buku ini ditulis, masih terdapat beberapa data yang belum tercantum. Hal ini disebabkan oleh kurang lengkapnya data yang terkumpul karena terjadinya perubahan struktur organisasi dalam kurun tersebut.

Dengan adanya buku ini kami berharap bahwa berbagai aktivitas yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Nilai Sejarah ini dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan aktivitas dan penyusunan kebijakan kesejarahan di masa datang. Hal ini tak terlepas dari peranan Direktorat Nilai Sejarah dalam pengembangan nilai sejarah dalam rangka pembangunan karakter bangsa.

Penulisan buku ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu tak lupa kami sampaikan terima kasih termasuk kepada tim penulis. "Tak ada gading yang tak retak" begitu pula buku ini. Dalam buku masih terdapat kekurangan. Kami senantiasa mengharapkan saran dan masukan demi kemajuan bersama di masa depan.

Jakarta, Desember 2010

Drs. Shabri Aliaman

NIP.19570505 198403 1 019

#### **DAFTAR ISI**

Penganta	ır Pe	nulis	i
Sambuta	n Dir	ektur Nilai Sejarah	ii
Daftar Is	i	***************************************	iii
Daftar Ta	abel	••••••	iv
BAB 1	PEN	DAHULUAN	i
	1.1	Dinamika Kelembagaan	
		Kesejarahan	1
	1.2	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	10
	1.3	Visi dan Misi	11
	1.4	Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan	
		Program	12
BAB 2	AKT	TIVITAS	16
	2.1	Subbagian Tata Usaha	17
	2.2	Subdirektorat Sumber Sejarah	19
	2.3	Subdirektorat Historiografi	36
	2.4	Subdirektorat Pemahaman	
		Sejarah	52
	2.5	Subdirektorat Dokumentasi dan	
		Publikasi	62
BAB 3	PEN	TUTUP	76
DAFTAR	PUS'	ГАКА	79

#### DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pegawai Menurut Golongan	17
Tabel 2.	Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	18
Tabel 3.	Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan	19
Tabel 4.	Lomba Karya Tulis SejarahJakarta,	
	9-10 November 2006	20
Tabel 5.	Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan dan	
	AudiovisualData Nama Tokoh yang diwawanc	arai
	Tahun 2006	22
Tabel 6.	Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan dan	
	Audiovisual	23
Tabel 7.	Penyelenggaraan Mukernas dan Workshop	
	Kesejarahan	25
Tabel 8.	Nama Pemakalah dan Topik atau Judul	
	Mukernas dan Workshop Kesejarahan	33
Tabel 9.	Kegiatan Sosialisasi Pedoman Penulisan	
	Sejarah Lokal	37
Tabel 10.	Penulis, Editor, dan Narasumber Sejarah	
	Pemikiran Indonesia	44
Tabel 11.	Tokoh-Tokoh yang ditulis dalam Buku Sejarah	
	Pemikiran Indonesia	46
Tabel 12.	Inventarisasi Data Sejarah Lokal	51
Tabel 13.	Lawatan Sejarah Nasional (LASENAS)	53
Tabel 14.	Peserta Lawatan Sejarah Nasional (LASENAS)	54
Tabel 15.	J	
	Nasional (LASENAS)	57

Tabel 16.	Dialog Interaktif Kesejarahan	58
Tabel 17.	Sayembara Komik Sejarah Tahun 2006	61
Tabel 18.	Pengembangan Sisitem Informasi Kesejarahan:	
	Penerbitan	63
Tabel 19.	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan	64
Tabel 20.	Pengembangan Sisitem Informasi Kesejarahan:	
	Dokumentasi Sumber Tertulis Kontemporer	
	(Kliping Koran)	66
Tabel 21.	Pengembangan Sisitem Informasi Kesejarahan:	
	Dokumentasi Sumber Tertulis Kontemporer	
	(Bundel Majalah)	67
Tabel 22.	Pengembangan Sisitem Informasi Kesejarahan:	
	Publikasi Kesejarahan	68
Tabel 23.	Pameran Kesejarahan	69
Tabel 24.	Penerbitan dan pencetakan Buku	70
Tabel 25.	Subtema yang dibahas dalam Konferensi	
	Nasional Sejarah VIII	73
	DAFTAR PETA	
Peta 1.	Sebaran Peserta LASENAS	56

### BAB 1 PENDAHULUAN

Kronika 5 th Direktorat Nilai Sejarah 2005-2009 ditulis dengan maksud untuk menghimpun data-data selama kurun waktu lima tahun tersebut. Keberadaan data-data ini dirasa cukup penting sebagai bahan evaluasi dan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan yang akan dilakukan pada waktu mendatang. Dalam beberapa bagian buku ini, masih terdapat data yang tidak tercantum, hal ini dikarenakan data yang terhimpun tidak lengkap dan terjadinya perubahan struktur beberapa kali.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diuraikan tentang perjalanan Direktorat Nilai Sejarah.

#### 1.1 Dinamika Lembaga Kesejarahan

Direktorat Nilai Sejarah merupakan unit eselon 2 (dua) yang menjalankan tugas dan fungsi-fungsi kesejarahan, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM 17/HK.001/MKP-2005 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Nilai Sejarah merupakan satu direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Direktorat Nilai Sejarah dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala. Sebelum membahas

lebih lanjut tugas pokok dan fungsi direktorat ini, perlu terlebih dahulu digambarkan dinamika lembaga kesejarahan ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang silih berganti baik dalam masa Orde Baru maupun pada masa Reformasi.

Dari waktu ke waktu, lembaga yang menangani kesejarahan selalu mengalami perkembangan dan perubahan, baik menyangkut nomenklatur maupun tugas dan fungsinya. Perubahan ini sejalan dengan perubahan yang terjadi pada departemen/kementrian maupun direktorat jenderal yang menangani masalah kebudayaan. Seperti tahun-tahun sebelumnnya, pada tahun 1969 hingga tahun 2005 juga dilakukan berbagai proses penataan kelembagaan di bidang kebudayaan, termasuk unit kerja yang menangani bidang kesejarahan. Sehubungan dengan itu unit kerja kesejarahan mengalami beberapa kali perubahan nama, tugas dan fungsinya. (Nunus Supardi dkk, 2004).

Berdasarkan Kepres No. 39 tahun 1969 dan Kepres No. 84 tahun 1969 tentang Kelembagaan Pemerintahan, melahirkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 141 tahun 1969 yang menetapkan Susunan Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan satu di antara beberapa unit eselon 1 (satu) di dalamnya adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan terdapat beberapa unit eselon 2, satu di antaranya adalah Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA). Lembaga ini ditugasi untuk menangani masalah-masalah di bidang kesejarahan dan antropologi pada waktu itu. LSA memiliki 2 (dua) unit kerja pendukung di daerah yaitu LSA cabang Yogjakarta dan LSA cabang Makassar.

Cabang-cabang ini membantu tugas dan fungsi LSA Pusat sesuai wilayah masing-masing.

Lima tahun kemudian, kembali terjadi perubahan, tepatnya pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Kepres No. 45 tahun 1974 tanggal 26 Agustus 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. Pada nomor urut 12 Kepres tersebut, tercantum nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai satu di antara unit-unit eselon I. Direktorat jenderal kebudayaan ini membawahi beberapa unit eselon 2 (dua) yang menangani masalah-masalah kebudayaan, antara lain sejarah, nilai tradisional, bahasa, museum, dan kepurbakalaan. Nomenklatur LSA yang menangani bidang sejarah dan antropologi berubah menjadi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Pus PSB). Seluruh fungsi penelitian dan pendokumentasian bidang sejarah, antropologi budaya, dan geografi budaya ditampung dalam lembaga baru ini. Unit kerja pendukung di daerah pun berganti nama, LSA cabang Yogjakarta dan LSA cabang Makassar berganti nama menjadi Balai Kajian Sejarah dan Budaya. Unit kerja ini merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pendokumentasian Sejarah dan Budaya di daerah.

Pada tahun 1979 kembali terjadi perubahan organisasi berdasarkan Kepres No. 47 tahun 1979 tentang Perubahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya yang menangani bidang kebudayaan. Pada pasal 12 ayat (2) disebutkan nama Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Ditjarahnitra). Ditjarahnitra merupakan nomenklatur baru yang

menggantikan status Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Terbentuknya Ditjarahnitra dilakukan mengingat sangat diperlukannya fungsi direktiva yaitu fungsi pembinaan, penanaman dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan nilai budaya kepada masyarakat. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional terdiri atas: Sub Direktorat Sejarah, Sub Direktorat Nilai Budaya, Sub Direktorat Sistem Budaya, Sub Direktorat Lingkungan Budaya, dan Sub Direktorat Dokumentasi dan Publikasi, serta satu Bagian Tata Usaha. Di daerah, Balai Kajian Sejarah dan Budaya ikut berganti nama menjadi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT). Seiring berjalannya waktu BKSNT berkembang menjadi 11 (sebelas) unit pelaksana teknis. Kesebelas BKSNT yang berkantor di ibukota propinsi tersebut adalah BKSNT Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Bandung, Yogjakarta, Pontianak, Manado, Makassar, Denpasar, Ambon, dan Jayapura. Wilayah kajian masing-masing BKSNT meliputi lebih dari satu propinsi berdasarkan kategori kesamaan latar belakang sejarah dan budayanya.

Periode tahun 1979 hingga 1998 Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional tidak mengalami perubahan. Sejak 1979 direktorat ini berturut-turut dipimpin oleh Dr. S. Boedhisantoso (1981-1994), Dr. Anhar Gonggong (1994-2000), dan Dr. Susanto Zuhdi (2000-2006). Dr. S. Boedhisantoso dan Dr. Susanto Zuhdi berasal dari Universitas Indonesia, adapun Dr. Anhar Gonggong adalah pejabat karir dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sampai dengan tahun 1996 Direktorat Jenderal Kebudayaan berkantor di Jalan Cilacap 4, Jakarta. Kemudian pada awal tahun 1997, kantor Direktorat Jenderal Kebudayaan

bergabung ke Kompleks Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan-Jakarta.

Patut dicermati bahwa dengan perubahan ini, posisi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional menjadi unik, karena meskipun fungsi yang semestinya adalah bersifat direktiva, namun dalam kenyataan fungsi penelitian yang dimiliki oleh Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya masih tetap melekat. Dengan demikian tugas pokok dan fungsi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dapat disebut bersifat ganda, berbeda dengan unitunit direktorat lain yang tidak memiliki fungsi penelitian. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya kerancuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di daerah dan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program serta dalam penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Di dalam unit Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional terdapat UPT Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang menitikberatkan pada fungsi penelitian, sehingga memiliki tenaga fungsional peneliti. Sementara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional sebagai pembinanya tidak memiliki fungsi peneliti dan dengan sendirinya tidak memiliki tenaga pegawai yang menduduki jabatan fungsional peneliti. (Nunus Supardi dkk 2004).

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Ditjarahnitra mengembangkan sistem hubungan keorganisasian yang bersifat struktural, fungsional dan teknis operasional antara pusat dan unit-unit pendukung di daerah. Di samping Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang merupakan unit kerja pendukung langsung, Ditjarahnitra juga mempunyai unit kerja pendukung tidak langsung yaitu Bidang Sejarah dan Nilai

Tradisional (di Kanwil Depdikbud Tipe A) serta Bidang Permuseuman, Sejarah dan kepurbakalaan (di Kanwil Depdikbud Tipe B).

Melalui beberapa kali studi banding antara Ditjarahnitra dengan unit-unit pendukung dicapai kesepakatan pembagian tugas dan fungsi masing-masing unit. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional melakukan tugas dan fungsi penelitian di daerah, sedangkan tugas dan fungsi pembinaan di daerah dilakukan oleh bidang Sejarah dan Nilai Tradisional serta Bidang permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan.

Perubahan-perubahan di bidang kelembagaan kebudayaan termasuk kesejarahan kembali terjadi pada tahun 2000 pasca lengsernya Presiden Soeharto dari kepemimpinan Orde Baru. Gerakan reformasi telah membawa harapan baru akan perubahan pada berbagai bidang termasuk reformasi birokrasi. Pemilihan Umum pertama setelah reformasi diselenggarakan pada tahun 1999. Dalam sidang umum MPR tahun itu juga Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Pada tahun 2000, keluar Kepres No. 177/2000. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid mengganti nomenklatur beberapa kementerian, antara lain mengubah nomenklatur Kementerian Negara Pariwisata, Seni dan Budaya menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan bidang Kebudayaan beralih dari Departemen Pendidikan Nasional ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Perubahan-perubahan ini juga berdampak pada unit kerja yang menangani masalah kesejarahan.

Berdasarkan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/KMKP/2001, tanggal 8 Maret 2001, ditetapkan struktur organisasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Unit kerja yang menangani bidang kebudayaan dimekarkan menjadi 2 (dua) unit eselon I, yaitu (1) Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film (NBSF) dan (2) Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala (SEPUR). Terkait dengan perubahan tersebut, unit eselon 2 yang menangani bidang kesejarahan turut mengalami perubahan nama dari sebelumnya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional menjadi Direktorat Sejarah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Direktorat Sejarah dipimpin oleh seorang direktur yaitu Dr. Susanto Zuhdi. Sedangkan unsur nilai budaya menjadi direktorat tersendiri yaitu Direktorat Nilai Budaya di bawah Direktorat Jenderal NBSF.

Perubahan tersebut tidak bertahan lama, karena masih dalam tahun 2001, terjadi lagi perubahan pimpinan nasional. Presiden Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarnoputri dan dibentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Gotong Royong. Dalam susunan kabinet tersebut, nomenklatur Departemen Kebudayaan dan Pariwisata diganti menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Perubahan ini tertuang dalam Kepres No. 101 tahun 2001. Berdasarkan Kepres ini, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.38/OT.001/MNKP-01 tanggal 6 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Pada dasarnya

bidang yang menangani kebudayaan hanya berubah nama dari Direktorat Jenderal menjadi Kedeputian, yaitu Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala berubah menjadi Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala. Pada kedeputian ini, unit eselon II yang menangani bidang kesejarahan bernama Asisten Deputi Urusan Pemahaman Makna Sejarah dan Integrasi Bangsa dan yang menjabat sebagai Asisten Deputi adalah Drs. Luthfi Asiarto.

Perubahan nomenklatur ini, membawa konsekuensi pada perubahan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dan kebutuhan tenaga pegawai. Sebagaimana diketahui bahwa tugas Kementerian negara hanya menangani tupoksi yang terkait dengan penyusunan kebijakan saja, sedangkan untuk pelaksanaan kebijakannya harus ditangani oleh suatu badan tersendiri. Karena itu, sesuai persetujuan Menpan No. 302/ M.PAN/II/2001 tanggal 23 November 2001, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar) yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala BP Budpar No. KEP-01/BP BUDPAR/2001 tanggal 13 Desember 2001. Dalam struktur baru ini terdapat antara lain nomenklatur eselon I yang menangani bidang kebudayaan yaitu Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya dan di dalamnya terdapat antara lain unit eselon II yang menangani bidang sejarah yaitu Direktorat Sejarah yang dipimpin oleh Kepala Direktorat yaitu Dr. Susanto Zuhdi.

Keberadaan BP Budpar tidak berlangsung lama, setelah melalui dinamika yang cukup menyita waktu, tenaga dan pikiran, pada tahun 2003 BP Budpar dibubarkan dan kemudian digabung menjadi satu dengan Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai akibat dari penggabungan ini, susunan organisasi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata menjadi amat besar, terutama unit eselon I yang menangani Bidang Kebudayaan menjadi 3 (tiga) unit eselon I yaitu: Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, dan Deputi Bidang Seni dan Film. Pada Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala ini terdapat 2 (dua) unit eselon 2 yang menangani bidang kesejarahan, yaitu Asisten Deputi Urusan Sejarah Nasional dengan Asisten Deputi Dr. Susanto Zuhdi dan Asisten Deputi Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa dengan Asisten Deputi Magdalia Alfian, MA.

Perubahan nomenklatur dan struktur organisasi kembali terjadi seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan secara langsung untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Pada pertengahan tahun 2005 nama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor: PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, unit eselon 2 yang menangani bidang kesejarahan menjadi 2 unit eselon 2 yaitu Direktorat Nilai Sejarah dan Direktorat Geografi Sejarah. Sejak itu, Direktorat Nilai Sejarah dipimpin oleh Dr. Magdalia Alfian dan terhitung mulai tanggal 6 Maret 2008 hingga kini

Dr. Magdalia Alfian diganti oleh Drs. Shabri Aliaman. Sebelumnya, Drs. Shabri Aliaman adalah Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

#### 1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor: PM 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Nilai Sejarah merupakan salah satu direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut Direktorat Nilai Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang nilai sejarah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Nilai Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan standar dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang nilai sejarah;
- b. perumusan standar norma, kriteria, dan prosedur di bidang sumber sejarah, historiografi, dan pemahaman sejarah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber sejarah, historiografi, dan pemahaman sejarah;
- d. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang sumber sejarah, historiografi, dan pemahaman sejarah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, di dalam Direktorat Nilai Sejarah terdapat 4 Sub-Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, setiap sub direktorat terdiri atas 2 seksi. Keempat Sub-direktorat dan masing-masing seksinya adalah:

- Sub-Direktorat Sumber Sejarah, terdiri atas Seksi Sumber Sejarah Tertulis dan Seksi Sumber Sejarah Lisan dan Audiovisual.
- Sub-Direktorat Historiografi, terdiri atas Seksi Sejarah Indonesia dan Wilayah dan Seksi Sejarah Lokal.
- Sub-Direktorat Pemahaman Sejarah, terdiri atas Seksi Sosialisasi Makna Sejarah dan Seksi Internalisasi Pengajaran Sejarah.
- 4. Sub-Direktorat Dokumentasi dan Publikasi, terdiri atas Seksi Dokumentasi dan Seksi Publikasi.

#### 1.3 Visi dan Misi

#### Visi

"Menjadikan Direktorat Nilai Sejarah sebagai fasilitator dan katalisator dalam mewujudkan kesadaran sejarah yang mampu memperkokoh jati diri dan integrasi bangsa."

#### Misi

"Melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesejarahan bagi masyarakat."

#### 1.4 Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program

#### Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Nilai Sejarah, tujuan yang hendak dicapai adalah:

- Tersedianya sumber-sumber dan buku-buku sejarah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya mengembangkan pengetahuan sejarah.
- 2. Terwujudnya pemahaman nilai-nilai kesejarahan bagi masyarakat khususnya dikalangan generasi muda.
- Tersedianya sitem informasi kesejarahan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 4. Terwujudnya kerjasama antar instansi terkait dalam pengembangan kesejarahan.

#### Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran sejarah sebagai jati diri bangsa.
- 2. Meningkatnya minat generasi muda terhadap pelajaran sejarah.
- 3. Meningkatnya motivasi dan kreatifitas guru sejarah dalam pengajaran sejarah.
- 4. Meningkatnya kualitas pengajaran sejarah di sekolah.

- 5. Terdokumentasikannya sumber-sumber sejarah lisan, tertulis, dan *audiovisual*.
- 6. Meningkatnya minat masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menulis sejarah lokal.
- 7. Meningkatnya layanan kebutuhan informasi kesejarahan dalam berbagai bentuk website, perpustakaan, terbitan sejarah.
- 8. Bertambahnya penyedian kebutuhan penunjang informasi

#### Kebijakan

Dalam upaya untuk mencapai sasaran bidang nilai sejarah/kesejarahan, maka arah kebijakan Direktorat Nilai Sejarah sebagai salah satu stakeholder/pemangku kepentingan peningkatan kesadaran sejarah diarahkan kepada 3 hal pokok yaitu:

- Mendorong Pemerintah Daerah untuk menggali potensi daerahnya melalui penulisan sejarah lokal.
- Meningkatkan peran serta dan pembinaan masyarakat dalam upaya peningkatan Kesadaran sejarah.
- Meningkatkan pelayanan informasi kesejarahan kepada masyarakat.

#### **Program**

Dengan mengacu pada arah kebijakan peningkatan kesadaran sejarah pada masyarakat, program-program

pembangunan yang dilaksanakan Direktorat Nilai Sejarah pada tahun 2005-2009 adalah:

- Penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber sejarah, kegiatannya antara lain:
  - a. Perekaman Sumber Tertulis dan Lisan;
  - b. Perekaman Sumber Sejarah Audiovisual;
  - c. Perekaman Sejarah Kota-Kota Tua;
  - d. Transliterasi Naskah.
- 2. Peningkatan penulisan sejarah, kegiatannya antara lain:
  - a. Sosialisasi Pedoman Penulisan Sejarah Lokal;
  - b. Penulisan Sejarah;
  - c. Penulisan Sejarah Pemikiran Indonesia;
  - d. Sosialisasi penulisan buku *Indonesia dalam Arus*Sejarah
  - e. Monitoring dan evaluasi.
- 3. Pemahaman nilai-nilai dan peningkatan kesadaran sejarah bagi masyarakat, kegiatannya antara lain:
  - a. Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas);
  - b. Dialog Interaktif Kesejarahan;
  - c. Lomba Karya Tulis Sejarah untuk Siswa SLTA;
  - d. Lomba Komik Sejarah untuk Mahasiswa;
  - e. Workshop Kesejarahan.
- 4. Peningkatan pelayanan informasi kesejarahan, kegiatannya antara lain:
  - a. Pengembangan Sistem Informasi Kesejarahan;
  - b. Penerbitan Warta Sejarah;

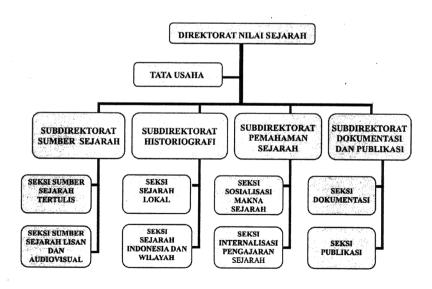
- c. Pengadaan Koleksi Perpustakaan;
- d. Pencetakan dan Distribusi buku-buku Sejarah;
- e. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Dokumentasi.

#### 5. Seminar dan Konferensi

- a. Konferensi Nasional Sejarah (KNS) di Jakarta tahun 2006;
- Musyawarah Kerja Nasional Pengajaran Sejarah di Surabaya tahun 2006;
- Diskusi Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah di Yogjakarta tahun 2006.

### BAB 2 AKTIVITAS

Bab ini menyajikan data-data dari hasil kegiatan Direktorat Nilai Sejarah selama kurun waktu lima tahun 2005-2009. Sajian data belum bisa menampilkan kondisi keseluruhan selama kurun waktu tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain belum adanya data yang lengkap dan terjadinya perubahan struktur organisasi (lihat bab 1). Karena itu data yang disajikan merupakan data yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Nilai Sejarah sampai tahun 2009. Adapun data-data hasil kegiatan yang disajikan, urutannya disesuaikan dengan urutan nomenklatur pada Direktorat Nilai Sejarah. Bagan berikut memperlihatkan susunan struktur organisasi Direktorat Nilai Sejarah.



#### 2.1 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam hal penatausahaan. Kurun waktu lima tahun jabatan Kepala Subbagian (Kasubbag) Tata Usaha Direktorat Nilai Sejarah telah mengalami dua kali pergantian. Tahun 2005-2008 posisi Kasubbag dijabat oleh Drs. Sugiyanto. Berikutnya tahun 2008-2009 dijabat oleh Dra. Siwi Riatiningrum. Periode jabatan Dra. Siwi Riatiningrum cukup singkat dikarenakan yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

Keberadaan Direktorat Nilai Sejarah tidak terlepas dari dukungan pegawai-pegawainya. Secara keseluruhan pegawai-pegawai di lingkungan direktorat ini terbagi atas beberapa golongan. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1.

TABEL 1
PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO	TAHUN	GOLONGAN			N	TITME AT	KETERANGAN
NO	TAHUN	I	I II III IV		JUMLAH	KEIEKANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2005	-	-	-	-	-	Data tidak ada
2	2006	-	10	33	4	47	
3	2007	-	8	30	4	42	
4	2008	-	8	27	5	40	
5	2009	-	6	32	5	43	

Tabel 1 menunjukkan perkembangan jumlah pegawai Direktorat Nilai Sejarah dilihat dari golongan/tingkat. Tahun 2005 data jumlah pegawai menurut golongan belum ditemukan, hal ini disebabkan perubahan nomenklatur dan struktur organisasi. Selama kurun waktu lima tahun, pegawai golongan III jumlahnya lebih banyak dari golongan lainnya. Selain masa kerja, tingkat pendidikan juga mempengaruhi golongan seorang pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 yang menjelaskan data pegawai menurut tingkat pendidikan.

TABEL 2
PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

MO	TITIN	TINGKAT PENDIDIKAN						JML	T/D/IP
NO.	THN	SD	SMP	SMA	S <sub>1</sub>	S2	<b>S</b> 3	JML	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2005	-	-	-	-	-	-	•	Data tdk ada
2	2006	2	1	20	22	1	1	47	
3	2007	2	1	17	20	1	1	42	
4	2008	2	1	16	19	2	-	40	
5	2009	2	1	16	21	3	-	43	

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Direktorat Nilai Sejarah pada jenjang S1 merupakan jumlah terbanyak disusul tingkat pendidikan SMA. Pengembangan Intelektual kesejarahan bagi pegawai (S1) semakin dibutuhkan, sehingga beberapa pegawai mulai melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu (S1) dan strata dua (S2) jurusan Sejarah dan jurusan lainnya.

Apabila tabel 2 memperlihatkan data pegawai menurut tingkat pendidikan, maka tabel 3 berikut ini menyajikan data pegawai menurut kualifikasi pendidikan.

TABEL 3
PEGAWAI MENURUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN

		KUALIFIKASI PENDIDIKAN						
NO	THN	SEJ	SOS	нкм	ЕКО	ADM	DLL (SMA/ SMP/SD)	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2005	-	-	-	-	-	-	-
2	2006	13	1	1	1	3	28	47
3	2007	13	1	2	-	2	24	42
4	2008	13	-	1	-	2	24	40
5	2009	16	-	1	-	2	24	43

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Nilai Sejarah yang membidangi kesejarahan, maka kualifikasi pendidikan yang diutamakan adalah Sarjana Sejarah. Pada tahun 2009, pegawai dengan kualifikasi pendidikan sejarah bertambah menjadi tiga orang. Penambahan ini berasal dari adanya penerimaan pegawai baru 1 orang di pertengahan tahun 2008, dan 2 orang di tahun 2009. Meskipun demikian, penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan dengan latar belakang ilmu sejarah masih dibutuhkan mengingat tiap tahunnya ada pegawai yang memasuki masa purna tugas. Demikian pula kualifikasi pendidikan lainnya, seperti Sarjana Komunikasi, Pendidikan, dan lainnya, masih dibutuhkan untuk mendukung kinerja Direktorat pada umumnya.

#### 2.2 Subdirektorat Sumber Sejarah

Sampai sekarang Subdirektorat Sumber Sejarah dikepalai oleh Dra. Sri Indra Gayatri, dibantu dua orang kepala seksi yaitu Dra. Puspa Dewi dan Drs. Isak Purba. Di bawah ini disajikan data mengenai capaian subdirektorat Sumber Sejarah dalam kurun tahun 2005-2009.

TABEL 4
LOMBA KARYA TULIS SEJARAH (LKTS)

Jakarta, 9-10 November 2006

	PEMENANG				
JUARA	NAMA/ ASAL SEKOLAH	JUDULLKTS			
1.7	2	3			
1	Yosefa Dian Aristya- SMA 1 Singaraja Bali	Implementasi nilai-nilai kepahlawanan I Gede Dharma dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat Buleleng melalui media seni dan budaya			
2	Bobby Prima- SMA 1 Curuk Bengkulu	Peran Zainul Bakti dalam mempertahankan Kemerdekaan			
3	Prima Interpares SMA 6 Yogyakarta	Nyi Tjondrolukito, Perempuan pejuang seni yang Mengangkat Harkat Budaya			
4	Harlisa Nari SMA 1 Pasarwajo Buton	Filosofi Balimo Karo Somanamo Lipu, tesis sejarah Kepahlawanan dan Kesetiaan Buton terhadap NKRI			
5	Trias Karsita SMA 2 Pati	Bukan Perempuan Biasa, langkah perjuangan Nyi Ageng			
6	Pius Dwi Setiyo SMA Fransiscus- Bandar Lampung	Pengaruh Nilai kepahlwanan terhadap perkembangan prestasi generasi muda			

LKTS ini diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menulis siswa-siswi SLTA dalam bidang kesejarahan. Dari 1000 leaflet LKTS yang disebarkan ke seluruh Indonesia, naskah karya tulis kesejarahan yang masuk berjumlah

121 buah. Karya-karya yang masuk memiliki tema yang bervariasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Sesuai kriteria penilaian, maka terpilih enam finalis terbaik yang selanjutnya ditentukan lagi untuk mengetahui juara pertama hingga keenam. Dewan juri dalam lomba ini adalah Dr. Anhar Gonggong (Sejarawan), Sri Rahayu Budiarti (Sesditjen. Sejarah dan Purbakala), Dr. Susanto Zuhdi (Direktur Geografi Sejarah), Ibnu Ooyim, M.A (Peneliti LIPI), Iskandar, M.Hum (Dosen Sejarah UI), Abdul Syukur, M.Hum (Dosen Sejarah UNJ), Tri Wahyuningsih, MA (Dosen Sejarah UI), Umasih, M.Hum (Dosen Sejarah UNJ), Kasijanto, M.Hum (Dosen Sejarah UI), Gatot Gautama, MA (Direktorat Peninggalan Bawah Air). Kriteria penilaian dalam lomba ini meliputi tiga aspek. Pertama, Isi: Kelengkapan informasi dan keaslian dan kelogisan uraian. Kedua, Penyajian: sistimatika penulisan, susunan keseimbangan, dan hubungan antar bab, kecermatan, dan kerapihan. Ketiga, Bahasa: kelugasan, ketepatan informasi/ penggunaan istilah, tata tertib penulisan.

Keberhasilan pelaksanaan LKTS ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seluruh Indonesia. Melihat antusiasme peserta sudah selayaknya lomba seperti ini dijadikan sebagai agenda rutin tiap tahun. Selain meningkatkan pemahaman dan kemampuan menulis sejarah juga sebagai sarana pembentukan karakter dan jatidiri bangsa bagi generasi muda.

TABEL 5

#### PENGUMPULAN SUMBER SEJARAH LISAN DAN AUDIOVISUAL DATA NAMA TOKOH YANG DIWAWANCARAI TAHUN 2006

NO	NAMA TOKOH	JABATAN
1	2	3
1	Irwandi Yusuf	Sebagai juru runding GAM. Jabatan saat ini menjadi Gubernur Aceh
2	Muzakir Manaf	Panglima GAM
3	Darwis Jeuneb	Panglima GAM Wilayah Batee Iliek
4	Rusdi Sufi	Kaum Intelektual, Sejarawan
5	Darni Daud	Kaum Intelektual, Rektor Universitas Syah Kuala
7	Muslim Ibrahim	Tokoh masyarakat, Ketua Majelis Permusyawaratan Agama (MPU Aceh)
8	Badruzzaman	Tokoh masyarakat, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA)

Dari tabel 5, dapat dijelaskan bahwa pengumpulan sumber sejarah lisan dan audiovisual dilakukan di Kota Banda Aceh pada 26-29 September 2006 dengan mitra kerja pendukung Balai Pelestarian Sejarah dan Purbakala (BPSNT) Aceh dan Pemda Aceh. Namun dalam pelaksanaannya sumber sejarah yang diharapkan dari petinggi GAM Irwandi Yusuf, Muzakir Manaf, dan Darwis Jeuneb tidak diperoleh. Hal ini dikarenakan kondisi yang belum stabil saat itu, yakni baru saja terjadi perdamaian antara RI dengan GAM, sehingga sensitivitas politik dan keamanan masih labil. Output yang dihasilkan berupa 240 keping VCD yang telah disebarkan kesebelas BPSNT di Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, CSIS Jakarta, Perpustakaan Arsip Nasional, Sekertariat Wakil Presiden, Sekertariat Negara, dan juga ke lembaga-lembaga lainnya.

Kegiatan pengumpulan sumber sejarah lisan melalui wawancara ini dipilih tema Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tema ini dianggap penting, dan layak untuk ditulis. Tokoh-tokoh GAM seperti yang tercantum dalam tabel 5 adalah tokoh-tokoh penting dalam GAM dan menjadi narasumber dalam wawancara tersebut. Kepedulian Direktorat Nilai Sejarah untuk mengumpulkan sumber sejarah lisan dan audiovisual dimaksudkan untuk melengkapi sumber tekstual yang ada. Hal ini juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Sumber Sejarah yaitu melakukan pengumpulan sumber sejarah dalam bentuk tertulis, lisan, maupun audiovisual. Jika tabel 5 memperlihatkan pengumpulan sumber lisan dan audiovisual dengan mengangkat tema GAM, maka tabel 6 memperlihatkan tema yang berbeda untuk pengumpulan sumber sejarah lisan dan audiovisual.

TABEL 6
PENGUMPULAN SUMBER SEJARAH LISAN DAN
AUDIOVISUAL

NO	THN	TEMA	LOKASI
1	2	<b>3</b>	4
1	2007	Perekaman Sejarah Melayu di Pulau Penyengat "Menelusuri Kegemilangan Pulau Penyengat: Sejarah, Budaya, Bahasa"	Pulau Penyengat Kepulauan Riau
2	2008	Perekaman Tempat-tempat Pengasingan Pahlawan Proklamator (Soekarno)	Bandung Ende Bengkulu

Sumber sejarah dalam bentuk audiovisual dirasakan tepat sebagai media alternatif pembelajaran sejarah. Dari beberapa

kali pengumpulan sumber sejarah lisan dan audiovisual ini, output yang berupa VCD dibagikan ke sekolah-sekolah sebagai media pembelajaran sejarah. Pengemasan pengumpulan sumber sejarah lisan dan audiovisual ini mempunyai tema yang berbeda tiap tahunnya. Selain melakukan pendokumentasian terhadap tempat-tempat bersejarah, juga dilakukan wawancara terhadap saksi atau pelaku sejarah terkait dengan tema yang diambil.

VCD hasil rekaman yang telah dibagikan ke sekolahsekolah mendapatkan respon positif dari siswa dan guru. Hal ini terlihat dari kuesioner yangdikirim beserta VCD tersebut.

Tidak hanya melakukan pengumpulan sumber sejarah, subdirektorat ini juga melakukan workshop kesejarahan. Tahun 2006 di Surabaya diadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Pengajaran Sejarah. Tujuan dilaksanakannya adalah mencari rumusan tentang metode dan teknis pengajaran sejarah. Salah satu butir rekomendasi dari kegiatan Mukernas adalah pentingnya dilaksanakan Workshop Kesejarahan. Karena itu pada tahun 2007-2009 diselenggarakan Workshop Kesejarahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

TABEL 7
PENYELENGGARAAN MUKERNAS DAN WORKSHOP
KESEJARAHAN

NO	TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENDUKUNG	ТЕМА
1	2	3	4
1	Surabaya, 11-14 Juli 2006	Depdiknas, Pemprov. Jawa Timur, MSI Cabang Jawa Timur	Pendidikan Sejarah untuk Pembentukan Kepribadian dalam Konteks Multikultural
2	Bandung, 24-28 Juli 2007	Depdiknas, Pemkot. Bandung, MSI Cabang Jawa Barat	(tidak ada tema)
3	Medan, 28-31 Mei 2008	Depdiknas, Pemkot. Medan, MSI Cabang Sumatera Utara	Pembelajaran Sejarah dalam Pengembangan Jatidiri Bangsa
4	Denpasar, 16-20 Juni 2009	Depdiknas, Pemkot. Denpasar, MSI Cabang Bali	Mengembangkan Budaya Demokrasi melalui Pembelajaran Sejarah

Mukernas Pengajaran Sejarah sebagai cikal bakal Workshop Kesejarahan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru-guru sejarah akan perkembangan metode dan materi kesejarahan. Output dari Workshop Kesejarahan adalah berupa Rumusan dan Rekomendasi Workshop. Melalui rumusan ini diharapkan mata pelajaran sejarah dan guru sejarah menjadi lebih diperhatikan dalam segi kualitas dan kuantitasnya. Adapun Rekomendasi yang telah dihasilkan dari Mukernas Pengajaran Sejarah dan Workshop Kesejarahan adalah sebagai berikut:

## Rekomendasi Mukernas Pengajaran Sejarah 11-14 Juli 2006 di Surabaya (27 - 2004 di 2004

- Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan fasilitas bagi penulisan buku sejarah yang benar-benar memiliki kriteria yang layak sebagai buku ajar.
- Pemerintah daerah hendaknya memberikan fasilitas bagi penulisan sejarah lokal. Sejarah lokal hendaknya selalu dilakukan revisi ketika menemukan data baru. Berbagai tema dapat dikembangkan pada sejarah lokal.
- 3. Buku ajar hendaknya disusun oleh pakar sejarah, ahli pendidikan sejarah dan ahli kurikulum.
- 4. Alokasi waktu pelajaran sejarah baik di tingkat SMP dan SMA hendaknya diberikan jumlah jam mata pelajaran yang layak. Jam mata pelajaran yang ada dalam kurikulum saat ini hendaknya diberikan tambahan jam pelajaran.
- disesuaikan dengan jurusan di SMA. Masing-masing jurusan di SMA hendaknya memiliki tujuan tersendiri dari mata pelajaran sejarah. Jurusan IPA bertujuan mendukung perkembangan ilmu dan teknologi, jurusan bahasa mendukung pengembangan seni dan budaya, jurusan IPS mendukung sosial, ekonomi, dan politik. Pada masingmasing jurusan tersebut harus menekankan aspek-aspek tertentu misalnya materi sejarah di IPS harus lebih banyak dengan hal-hal yang bersifat sosial, ekonomi, jurusan Bahasa perkembangan seni dan kebudayaan, sedangkan jurusan IPA dapat mempelajari sejarah perkembangan teknologi.

- Pelajaran sejarah di SMK hendaknya menjadi mata pelajaran tersendiri, bukan merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- 7. Hendaknya dibuat buku teks mata pelajaran sejarah untuk masing-masing jurusan di SMA yaitu jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Masing-masing buku ajar pada ketiga jurusan tersebut memiliki kekhasan sesuai dengan tujuan dari masing-masing jurusan.
- 8. Dalam format buku rapor dan ijazah siswa hendaknya dicantumkan nilai mata pelajaran sejarah.
- 9. Dalam rangka mendukung misi pelajaran sejarah, pemerintah hendaknya melakukan suatu kegiatan untuk merumuskan profil pendidikan *nation and* character *building*.
- 10. Dalam perumusan materi sejarah hendaknya instansiinstansi terkait seperti Direktorat Nilai Sejarah, Pusat Kurikulum, Pusat Perbukuan, dan instansi terkait lainnya mampu bekerjasama secara lintas sektoral.
- 11. Perlu pelatihan tentang metode pembelajaran terutama kepada guru sejarah seiring dengan perkembangan teknologi dan model pembelajaran.
- 12. Pemerintah perlu memfasilitasi ketersediaan media dan laboratorium sejarah.
- Perlu diberikan penghargaan kepada guru sejarah yang menunjukkan kinerja yang baik dan kreativitas yang tinggi.
- 14. Agar Depdiknas dan instansi terkait dapat membuka saluran informasi antar guru khususnya kurikulum sejarah.
- 15. Agar Depdiknas memberdayakan MGMP sejarah dalam menyusun kebijakan pengajaran sejarah tingkat SMA.

Rekomendasi	Workshop	Keseja	ırahan 24	-28 Juli	2007
di Bandung :	merupakan b	bukan	ter sendiri,	ounistia	

- 1. Perlu adanya pelatihan sejarah yang lebih terfokus pada
  Autu permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh guru
  tusb dalam melaksanakan pembelajaran di kelas melaksanakan perhatian pemerintah dalam bentuk
  insb kebijakan kebijakan yang bersifat mendasar dalam
  melakukan perubahan yang bersifat mendasar dalam
  melakukan perubahan perubahan yang bertitik tolak dari
  syan permasalahan yang dihadapi oleh guru sejarah.
- 3. Memberikan keleluasaan inn kepada inguru dalam dan mengembangkan berbagai keterampilan pembelajarah uskuyang tidakuterikat oleh aturah aturah yang bersifat mengekang terhadap kreatifitas guru sejarah. Hien,
- 412 m. Memberikan ibantuan berupa sarana dan prasarana yang tasu berkaitan dengan pembelajaran sejarah.
- 5 yaniMemberikansaksessinformasi yang memudahkan guru dalam upaya meningkatkan keterampilan pembelajaran dan saasi pengetahuan kesejarahannya satus) masi talog akto i 111
- 64:30 Untuk menindaklanjuti workshop kesejarahan ini perlu adanya kerjasaman sinergis kantara Departemen
- Pendidikan Nasional.
- Zany Perhijadanyasperubahan kurikulum sejarah baik yang agaimenyangkut standar isi maupun alokasi waktus
- izahirikushad guik darajes urug ansibeydaqtaynaba ulrafibul.8 sahiran informasi antarash unklutudaylanggab lisusasarah.

  15. Agar Depakkana memberdayakan MeCIP sejarah dalam menasarah kebijakan pengajarah sejarah tingkar SMA.

# Rekomendasi Workshop Kesejarahan 28-31 Mei 2008 di Medan:

- Perlu adanya kegiatan workshop kesejarahan bagi guruguru sejarah yang berkesinambungan, terencana, terarah, dan dapat memenuhi kebutuhan guru dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi guru kelas.
- Pemerintah, khususnya Depdiknas dan Dinas Pendidikan Provinsi serta Kabupataen/Kota hendaknya lebih memperhatikan dan memberdayakan MGMP mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga sekolah sebagai lembaga yang strategis dalam pengembangan peningkatan kualitas guru.
- 3. Keberadaan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia hendaknya lebih diperhatikan oleh pemerintah dan didukung keberadaannya sebagai organisasi profesi guru yang dapat dijadikan mitra oleh pemerintah dalam hal kesejarahan dan pendidikan sejarah.
- 4. Pemerintah memberikan kesempatan kepada guru sejarah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan lanjutan dengan mengirimkan kuliah pada jenjang pascasarjana baik tingkat Magister (S2), maupun Doktor (S3).
- Memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kualitasnya melalui kegiatan penelitian dan lomba inovasi guru sejarah baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota.
- 6. Pihak eksekutif dan legislatif dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota hendaknya memiliki kepedulian

- terhadap situs-situs sejarah yang keberadaannya kini terancam demi kepentingan ekonomi.
- Jam mata pelajaran sejarah hendaknya diberikan kepada seluruh jurusan siswa di SMU dengan jumlah mata pelajaran yang memadai.
- 8. Hendaknya memberikan ruang yang proporsional pada materi sejarah lokal pada kurikulum sejarah agar siswa lebih banyak mengenal sejarah daerahnya.
- Pemerintah hendaknya menyediakan buku pelajaran sejarah yang dapat memperkaya pengetahuan sejarah siswa baik pengetahuan tentang sejarah nasional maupun sejarah lokal.
- 10. Memperkenalkan kepada siswa materi-materi sejarah yang bersifat kontroversial sehingga mampu membangun siswa berfikir kritis dalam melihat kebenaran fakta sejarah.
- 11. Pemerintah hendaknya menyediakan alat dan media pembelajaran sejarah yang memadai agar pelajaran sejarah lebih menarik bagi siswa.
- 12. Penulisan sejarah yang baku harus melibatkan guru sejarah karena guru yang menerapkannya di lapangan.
- 13. Pemerintah hendaknya memfasilitasi penyelenggaraan olimpiade sejarah bagi siswa-siswa di sekolah.
- 14. Penempatan guru sejarah di sekolah-sekolah harus disesuaikan dengan kualifikasinya.
- 15. Mata pelajaran sejarah hendaknya termasuk mata pelajaran yang diujikan pada ujian akhir sekolah (UAS) dan tercantum dalam ijazah siswa.

 Dalam upaya peningkatan kecintaan siswa terhadap sejarah hendaknya banyak diproduksi film-film sejarah.

## Rekomendasi Workshop Kesejarahan 16-20 Juni 2009 di Denpasar:

- Perlu adanya peningkatan kegiatan pelatihan kompetensi guru-guru sejarah yang lebih berkesinambungan dan aplikatif sehingga mampu meningkatkan profesionalisme guru khususnya dalam konteks pedagogik.
- 2. Pemerintah hendaknya membangun suatu mekanisme yang mampu menguji kinerja guru yang bersifat sistematis dan berkesinambungan sehingga mampu menciptakan sistem penjaminan mutu guru.
- 3. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian penuh kepada keberadaan Muyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai lembaga asosiasi dengan cara memberikan bantuan dana sehingga lembaga tersebut mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menekankan pada peningkatan profesionalisme guru.
- 4. Pemerintah lebih banyak memberikan kesempatann kepada guru sejarah untuk melanjutkan jenjang pendidikan khususnya bagi guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi sehingga kualifikasi guru sejarah memenuhi standar nasional pendidikan.
- Perlu adanya peninjauan ulang terhadap porsi jam pelajaran pada mata pelajaran sejarah agar diberikan jam pelajaran yang lebih proporsional.

- 6. Mata pelajaran sejarah diajarkan pada seluruh jurusan di SMA dengan porsi yang merata dan mata pelajaran agar diperlakukan sebagai mata pelajaran umum bukan mata pelajaran khusus jurusan.
- 7. Pengembangan materi pelajaran sejarah hendaknya mampu membangun nilai-nilai seperti toleransi, kreativitas, kerja keras, pantang menyerah dan nilai-nilai positif lainnya.
- 8. Materi sejarah yang diberikan di sekolah hendaknya mampu mengungkap kebenaran dan berbagai hasil intepretasi agar memberikan wawasan yang luas kepada siswa dengan tetap memperhatikan nilai-nilai nasionalisme.
- 9. Perlu adanya suatu sistem penilaian pada mata pelajaran sejarah yang lebih menekankan pada aspek pembentukan sikap khususnya kepribadian bangsa dan jangan hanya sistem penilaian yang lebih banyak menekankan pada aspek kognitif saja.
- 10. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap struktur materi mata pelajaran sejarah sebagaimana yang tercantum dalam standar isi dengan melihat adanya perbedaan mendasar antar jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA sehingga tidak terjadi pengulangan materi yang membuat siswa bosan belajar sejarah.
- 11. Perlu adanya dukungan yang penuh dari pemerintah terhadap penerbitan buku Sejarah Indonesia ditinjau dari berbagai aspek dan Buku Sejarah Kebudayaan Indonesia agar dijadikan rujukan dalam materi pembelajaran sejarah di sekolah.
- 12. Pemerintah agar memelihara kearifan lokal yang dapat dijadikan salah satu pegangan nilai dalam membentuk kepribadian bangsa.

Rekomendasi-rekomendasi dari kegiatan Mukernas dan Workshop Kesejarahan tersebut ditindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada pihak Departemen Pendidikan Nasional. Untuk mengetahui pembicara dan topik makalah yang disampaikan dalam tiap kegiatan dapat dilihat dalam tabel 8.

TABEL 8

NAMA PEMAKALAH DAN TOPIK ATAU JUDUL

MUKERNAS DAN WORKSHOP KESEJARAHAN

NO	THN	PEMBICARA	TOPIK/JUDUL
1	2	3	4
1	2006	Suryadharma,	Pendidikan Multikultural dalam
		MPA, PhD.	Pengajaran Sejarah
		S. Hamid Hasan	Pendidikan Multikultural dalam
			Pengajaran Sejarah
		Dr. Anhar	Kompetensi dalam Pengajaran
		Gonggong	Sejarah, Ditengah Krisis Nilai dan
			Pendidikan (Pikiran Lepas untuk
			Bahan Dialog)
		Prof. Dr. Aminudin	Pendidikan Sejarah dan
		Kasdi	Pembentukan Karakter Bangsa
			(Nation and Character Building)
		Prof. DR. RZ	Masalah Buku Ajar : Bahan Dis-
		Leirissa	kusi untuk Mukernas di Surabaya
		Prof. Dr. Susanto	Pendidikan Sejarah Perekat
		Zuhdi	Bangsa dalam Masyarakat
			Majemuk:dengan Perspektif
			Multikultural?
		Dr. Agus Mulyana	Dari Perkebunan Hingga Stasiun:
			Pengembangan Materi dalam
			Pembelajaran Sejarah
		Umasih, M.Hum.	Kinerja Guru Sejarah SMA:
			Beberapa Kasus dari Daerah
			Pesisir hingga Kota Metropolitan
		Lukman	Penerapan Kooperatif Learning
		Nadjamuddin	Model Make a Match: Upaya
			Meningkatkan Prestasi Belajar
			Siswa dalam Pelajaran Sejarah

1	2	3	4	
		Ratna Hapsari	Mengajar Sejarah dengan Efektif: Sebuah Pengalaman	
2	2007	Dr. Dadang Supardan	Pengembangan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Sejarah	
		Nana Supriatna, M.Ed.	Penggunaan Konsep Ilmu Sosial dalam Konstruksi Pembelajaran Sejarah Kritis	
		Aminudin Al Rahab, M.Si.	Kontroversi dalam Sejarah : Belajar dari Persoalan Papua	
		Andi Ahdian (Ong Hok Ham Institute)	Masalah ke Indonesiaan dalam Didaktika Sejarah	
		Prof. Dr. Susanto Zuhdi	Perekat Bangsa suatu Tema Pembelajaran Sejarah	
		Helius Samsudin	Tema-tema dalam Sejarah	
		Umasih, M.Hum.	Mata Pelajaran Sejarah dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	
		S. Hamid Hassan	Kurikulum	
		Ratna Hapsari	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sejarah dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	
		Prof. Dr. Wasino		
		Prof. Dr.RZ Leirissa	Filsafat Sejarah	
		Dr. Agus Mulyana	Lingkungan Terdekat dan Constextual Teaching Learning dalam Pelajaran Sejarah	
		Wawan Darmawan	Living History dalam Pembelajaran Sejarah	
	Yani Kusmarni Menumbuhkan Minat Si Belajar Sejarah melalui A		Menumbuhkan Minat Siswa Belajar Sejarah melalui <i>Assisment</i> Kerja	
		Abrar	CTL dalam Pembelajaran Sejarah	
		Setiyadi S	Pendekatan Konsep dalam Pembelajaran Sejarah	
3	2008	Dr. Anhar Gonggong	Kebangkitan Nasional dalam Mengindonesia	

1	2	3	4
		Prof. Dr. Susanto	Penanaman Nilai-Nilai dalam
		Zuhdi	Topik-Topik Pembelajaran Sejarah
		Dr. Magdalia Alfian	Tema-Tema Kontroversial dalam
			Pembelajaran Sejarah
		Prof. Dr. Hamid	Metode Pembelajaran Sejarah
		Hassan	yang Menarik
		Dr. Agus Mulyana	Memilih Tema –Tema dalam
			Pembelajaran Sejarah
		Dra. Syamsidar	Media Pengajaran dalam
		Tanjung, M.Pd.	Pembelajaran Sejarah
		Dr. Phil. Ichwan	Warna Lokal dalam Pembelajaran
		Azhari	Sejarah Nasional
		Dr. Ratna MS	Pentingnya Sejarah Lokal
			dalam Pembelajaran Sejarah
		Dra. Ratna Hapsari	Melatih Siswa Berpikir Kritis
		1	dalam Proses Pembelajaran
			Sejarah
		Dr.Murni, MA	Pengembangan Kreativitas
		·	dalam Pembelajaran Sejarah
4	2009	Abdul Syukur,	Demokrasi dalam Pembelajaran
		M.Hum	Sejarah Indonesia
		Dr.Baedhowi	Kebijakan Depdiknas dalam
		,	Peningkatan Mutu Guru Sejarah
			di SLTA
		Dr. Agus Mulyana	Mengembangkan Keterampilan
			Penilitian dalam Pembelajaran
			Sejarah
		Ratna Hapsari,	Memahami Nilai-Nilai Universal
		M.Hum.	dalam Demokrasi Melalui
			Pembelajaran Sejarah
		Nengah Sudariya	Mengembangkan Sikap
			Demokratis dalam Pembelajaran
			Sejarah
		St. Sularto	Peranan Pers dan Sosialisasi
		- 1	Sejarah di Sekolah
		Lukman	Meningkatkan Minat Belajar
		Nadjamuddin,	Siswa dalam Pembelajaran
		M.Hum	Sejarah melalui <i>Thik-Pair-Square</i>
			Diintegrasi dengan Poker

1	2	3	4
		Dr. A.A. Bagus	Demokrasi Dalam Kearifan Lokal:
		Wirawan	Fenomena di Sunda Kecil
		Dr. Anhar	Sejarah dan Demokrasi antara
		Gonggong	Ada dan Tiada
	Dr. Magdalia Alfian Demokrasi dalam Perspektif		Demokrasi dalam Perspektif
		-	Sejarah sebuah Pengalaman

Dari tabel 8 menunjukan beragam topik atau judul telah disampaikan oleh pembicara. Latar belakang pembicara, dari kalangan akademisi maupun praktisi menjadikan Mukernas dan Workshop Kesejarahan kaya akan materi-materi yang menambah pengembangan mata pelajaran sejarah. Materi-materi yang telah didiskusikan menambah pengetahuan para peserta untuk mengembangkan kemampuan memberikan pengajaran sejarah kepada peserta didiknya.

## 2.3 Subdirektorat Historiografi

Hingga tahun 2009 Subdirektorat Historiografi dikepalai oleh Dra. Shalfiyanti, dibantu dua orang kepala seksi yaitu Kepala Seksi Sejarah Lokal Dra. Espita Riama dan Kepala Seksi Sejarah Indonesia dan Wilayah Dra. Herliswanny. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Seksi Sejarah Lokal melakukan kegiatan yang berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sejarah lokal. Untuk itulah diadakan kegiatan Sosialisasi Pedoman Penulisan Sejarah Lokal. Pedoman ini telah dirumuskan sejak tahun 2004. Dari tahun 2005 - 2009 telah dilaksanakan kegiatan ini di lima wilayah (lihat tabel 9).

## TABEL9 KEGIATAN SOSIALISASI PEDOMAN PENULISAN SEJARAH LOKAL

N O	PELAKSANAAN/ JML PESERTA	PEMBICARA	JUDULMAKALAH
1	2	3	4
1	2 20-23 September 2005  Hotel Sahid Kusuma-Solo 99 orang	• Prof. Dr. Taufik Abdullah • Dr. Wasino, M.Hum. • Dr. Mestika Z • Dr. Pudentia, MPPS • Dr. Rahayu Supanggah • Drs. T. Budiyono • Dr. Nina Lubis • Drs. Sudarmono, SU • Dra. Sri Supeni, M.Si. • Dr. Sutejo K. Widodo • Drs. I Ketut Sudiaksa	• Keynote Speaker  • Teori dan Metodologi Sejarah • Filsafat Sejarah • Tradisi Lisan sebagai Sumber Sejarah • Lirik Lagu sebagai Sumber Sejarah • Penelitian Bidang Sejarah: Masalah dan Prospeknya • Tokoh Lokal • Ingatan Kolektif Lokal: Surakarta  • Dinamika Kehidupan Surau di Minangkabau • Kerajaan ke Negara Kesatuan • Peranan Masyarakat Leles dalam • Penumpasan • Gerombolan DI/TII • Daerah Garut 1950-1965
		· Drs. I Made Purna	· Kembalinya Bali dari Negara Indonesia Timur ke NKRI th 1946-1950
		· Dra. Taryati	· Gorontalo: Abad ke- 19

1	2	3	4.
		· Drs. Saptoaji	Perkembangan dan Pengaruh tareqat Naqsabandiyah di Aceh
		· KRT. Budoyonagoro , S.Kar. · Drs. Mahmud Alamsyah · Drs. Sutoyo,	Prostitusi dan     Penanganan Penyakit     Kelamin di Jawa     Sejarah Hubungan     Pela Gandong antara     Desa Hitu,     Galala, Walakat, dan     Rumahtiga di Pulau     Ambon
		M.S.	· Kerusuhan Sambas
2	10-13 Mei 2006 Hotel Pusako- Bukittinggi		Tema: "Pembahasan Buku Pedoman Penulisan Sejarah Lokal"
		· Dr. Gusti Asnan	<ul> <li>Sejarah Daerah sebagai Kajian Sejarah Lokal di Era Otonomi Daerah</li> </ul>
		· Prof. Drs. Azmi, MA, Ph.D.	· Beberapa Catatan Tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal
		· Didik Pradjoko, M.Hum.	Sejarah Maritim Lokal sebagai Bidang Kajian Penulisan Sejarah Lokal
		Restu Gunawan, M.Hum.	Sejarah Lokal dalam Historiografi Indonesia
		D W 112	Tema: Pengalaman Menulis Sejarah Lokal dan Lisan
		· Dr. Mukhlis PaEni	· Pengalaman Menulis Sejarah Lokal

1	2	3	4
		· Dr. Nana	Sejarah Lisan untuk Sejarah Lokal
		Nurliana S, MA. · Hj. Pocut Nyak Haslinda	Pengalaman dalam Menulis Sejarah Leluhur dalam Melestarikan Nilai Sejarah Yang Hampir Punah
			Tema: Pengenalan dan Penggunaan Dokumen Sejarah
		· Mona Lohanda,M. Phil.	· Menelusuri Sumber Sejarah Lokal
		Dr. Mestika Zed	· Pengenalan dan Pemanfaatan Dokumen untuk Penulisan Sejarah Lokal
		· M Iskandar, M.Hum.	<ul> <li>Dokumen Tekstual dan Penelitian Sejarah</li> </ul>
		· Dr. Djufri · Drs. Aristo Munandar	Tema: Presentasi Potensi Wilayah untuk Kajian Sejarah Lokal Potensi Wilayah Kota Bukittinggi untuk Kajian Sejarah Lokal Potensi Wilayah Agam untuk Kajian Sejarah Lokal
3	23-26 Mei 2007	· Prof. Dr. RZ. Leirissa	Keynote Speaker
	Hotel Lombok Raya-Mataram	· Tri Wahyuning M Irsyam,	Diskusi Panel Sesi I  Metode Penelitian Sejarah
	109 orang	M.Si · Abdul Syukur,	· Penelitian dan

1 2	3	4
	M.Hum.	Penulisan Sejarah Lokal
	· Dr. Anhar Gonggong	Diskusi Panel Sesi II Metode Wawancara dalam Penulisan Sejarah Lokal: Sebuah Catatan Singkat
	· Ibnu Qoyim, SU.	Berdasarkan Pengalaman Pribadi  • Problema Penulisan Sejarah Lokal
	M Iskandar, M.Hum. Erniwati, M.Hum.	Diskusi Panel Sesi III  · Arsip sebagai Sumber Data Sejarah Lokal  · Kehidupan Etnis Tionghoa di Pariaman: Kegelapan Saat Mendukung Jepang
	· Dra. Siti Maryam · Didik Pradjoko, M.Hum.	Diskusi Panel Sesi IV Menulis Sejarah Lokal Daerah Nusa Tenggara Barat Penulisan Sejarah Maritim Lokal NTB: Sebuah Catatan Singkat
4 22-25 April 2008 Hotel	· Dr. Mukhlis PaEni	Keynote Speaker
Internasional- Banjarmasin 114 org	· Dr. M Iskandar	Diskusi Panel Sesi I Teknik Menulis Sejarah Lokal
	· Dr. Magdalia Alfian	· Metodologi Sejarah

1	2	3	4
		· Dr. Anhar Gonggong · Mona Lohanda, M.Phil.	Menyambung Hungungan Pentas Sejarah Nasional  Diskusi Panel Sesi II Pengalaman Menulis Sejarah Lokal Batavia Model Penulisan Sejarah Lokal
		· Dr. Bambang Subyakto, M.Hum.	Diskusi Panel Sesi III  · Hubungan Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah Hindia · Budidaya Karet di
		· Ita Syamtasia, M.Hum. · Dr. Tundjung	Kalimantan Selatan Perdagangan Laut
		· Dr. Endang Susilowati	Diskusi Panel Sesi IV Birokrasi Ketertiban dan Pertentangan Belanda (1826-1849)
		· Dr. MZ Arifin Anis	· Tanggapan dan Curah Pendapat Perwakilan Wilayah Daerah Tingkat I Prov. Kalimantan Selatan
5	26-29 Mei 2009	· Prof. Dr. AB	Keynote Speaker
	Hotel Sahid- Makassar	Lapian	"Kajian Sejarah Lokal dalam Perspektif Sejarah Maritim"
	170 orang		Sesi I Sub tema: Bagaimana Menulis Sejarah Lokal?
		· Dr. Mukhlis Paeni	· Sejarah Lokal sebagai Deposit

1 2	3	4
		Ekonomi Kreatif
	· Tri Wahyuning M Irsyam, M.Si.	· Sosialisasi Buku Pedoman Penulisan Sejarah Lokal
	· Dr. Anhar Gonggong · Mona Lohanda, M.Phil. · Drs. Surya Helmi	Sesi II Sub tema: Pengenalan dan Penggunaan Dokumen Sejarah Lisan dan Tertulis Lokalitas, Etnisitas, dan Nasionalitas Mencari Jejak Sumber Sejarah Maritim Penggunaan Sumber Kebendaan/Arkeologi dalam Penulisan Sejarah Lokal
	· Prof. Dr. Susanto Zuhdi · Prof. Dr. Sutejo K. Widodo	Sesi III Sub tema: Pengalaman Menulis Sejarah Lokal (Maritim) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa: Suatu Pengalaman Menulis Sejarah Lokal Ikan Layang Terbang Menjulang: Suatu Pengalaman Menulis Sejarah Lokal Maritim
	· Dr. Edward P	Sesi IV Sub tema: Sejarah Lokal sebagai Tema Film · Pengalaman Menulis

1 2	3	4
	M. Abduh Aziz	Sejarah Lokal (Sejarah Maritim)
		Film Sejarah: Alternatif Pendidikan Publik
	· Drs. Andi Rimbar · Drs. Abu Bakar	Sesi V Sub tema: Potensi-potensi Lokal Historiografi Konflik di Indonesia Perlawanan Rakyat UNRA Terhadap Pemerintah Militer Jepang

Sebelum kegiatan ini diprogramkan, pada tahun 2004 Direktorat Nilai Sejarah melakukan kegiatan penulisan buku pedoman penulisan sejarah lokal. Penulisan sejarah lokal harus berdasarkan atas kaidah sejarah, sehingga hasil tulisannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pedoman ini disusun oleh ahli-ahli yang berkompeten dengan bermacam latar belakang yang berhubungan dengan teknik penulisan maupun kajian sejarah lokal.

Buku tersebut digunakan sebagai acuan bagi stakeholder, pemerhati sejarah dan masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap peristiwa-peristiwa di daerah dan dapat menuliskannya atau paling tidak mampu menginventaris peristiwa lokal. Selanjutnya Direktorat Nilai Sejarah memprogramkan kegiatan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2005-2009 yaitu kegiatan "Sosialisasi Buku Pedoman Penulisan Sejarah Lokal".

Buku pedoman yang disosialisasikan di lima wilayah berbeda (lihat tabel 9). Dari pelaksanaan sosialisasi selama 5 (lima) tahun, akhirnya Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, berhasil melahirkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pedoman Penulisan Sejarah Lokal yang telah disebarluaskan ke seluruh provinsi di Indonesia. Dengan terbitnya NSPK tersebut diharapkan di tingkat lokal baik kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi sudah mempunyai dasar hukum teknik penulisan sejarah lokal yang baku.

Selain kegiatan Sosialisasi Buku Pedoman Penulisan Sejarah Lokal, pada tahun 2006 Subdirektorat Historiografi juga melaksanakan pencetakan naskah Sejarah Pemikiran Indonesia dengan Judul "Sejarah Pemikiran Indonesia sampai dengan tahun 1945". Untuk tahun 2007 dan 2009, Penulisan Sejarah Pemikiran berturut-turut sebagai berikut. Pada tahun 2007 ditulis "Sejarah Pemikiran Indonesia Periode 1945-1966", dan tahun 2009 "Sejarah Pemikiran Indonesia Periode 1967-1998". Penulis, Editor dan Narasumber berdasarkan tahun dapat dilihat pada tabel 10 dan 11.

TABEL 10
PENULIS, EDITOR DAN NARASUMBER
SEJARAH PEMIKIRAN INDONESIA

NO	THN	PENULIS	EDITOR	NARASUMBER
1	2	3	4	5
1	2006	<ul> <li>Dra. Umasih,</li> <li>M.Hum.</li> <li>Dra. Siswantari,</li> <li>M.Hum.</li> <li>Linda Sunarti,</li> <li>M.Hum.</li> <li>Dwi Mulyatari,</li> <li>MA.</li> <li>Abdurrahkman,</li> <li>M.Hum.</li> <li>Agus Setiawan,</li> <li>SS</li> </ul>	Dr. Magdalia Alfian Dr. Susanto Zuhdi Dr. Anhar Gonggong M Iskandar, M.Hum. Tri Wahyuning M Irsyam, M.Si. Abdul Syukur, M.Hum.	Dr. Anhar Gonggong Dr. Magdalia Alfian Dr. Susanto Zuhdi

1	2	3	4	5
2	2007	Dra. Shalfiyanti M Sanggupri B Dra. Herliswanny Restu Gunawan, M.Hum. Dra. Sri Indra Gayatri Dra. Shalfiyanti M Wasith, M.Hum. Didik Pradjoko,M.Hu m M Sanggupri B, S.Sos. Drs. Isak Purba Abdurrahkman, M.Hum Linda Sunarti, M.Hum. L Dwi Mulyatari, MA. Dra. Espita Riama Dra. Herliswanny	Dr. Magdalia Alfian Dr. Susanto Zuhdi Dr. Anhar Gonggong M Iskandar, M.Hum. Tri Wahyuning M Irsyam, M.Si. Abdul Syukur, M.Hum.	Prof. Dr. Susanto Zuhdi Dr. Anhar Gonggong Dr. M Iskandar Tri Wahyuning Irsyam, M.Si. Abdul Syukur, M.Hum.
3	2009	· Kresno Bramantyo, MA. · Drs. Suradi · Lamijo, SS. · Bambang Surowo, SS. · Toto Widiarso, SS. · Ais Irmawati, M.Si. · Subyarto, M.Hum. · Dra. Yosephine · Nur Artha, M.Si. · Qartum, SS.	· Kasijanto, M.Hum.	Dr. Magdalia Alfian Dr. Priyanto Wibowo Ibnu Qoyim, SU. Tri Wahyuning M Irsyam, M.Si. Abdul Syukur, M.Hum.

Tokoh-tokoh yang ditulis dalam buku sejarah pemikiran Indonesia dapat dilihat dalam tabel 11.

TABEL 11
TOKOH-TOKOH YANG DITULIS DALAM BUKU
SEJARAH PEMIKIRAN INDONESIA

No	Sejarah Pemikiran Indonesia sampai dengan tahun 1945	No	Sejarah Pemikiran Indonesia tahun 1945-1966	No	Sejarah Pemikiran Indonesia tahun 1966- 1998
1	2	3	4	5	6
1	Abdul Halim (KH)	1	Adam Malik	1	Abdul Azis
2	Abdul Kahar Muzakkir	2	Asrul Sani	2	Abdul Mukti Ali
3	Abdul Karim Amrullah (Dr. H.)	3	Achadiat Karta Mihardja	3	Abdul Karim Oei
4	Abdul Rahman Awad Baswedan	4	Abdul Haris Nasution	4	Abdul Rahman Wahid
5	Adenan Kapau Gani	5	Abdul Qohhar Mudzakar	5	Adnan Buyung Nasution
6	Agus Salim	6	Abu Hanifah	6	Adnil Hasnan Habib
7	Ahmad Dahlan	7	Alexander Evert Kawilarang	7	Alamsyah Ratu Perwiranegara
8	Ahmad Hassan	8	Abdul Azis	8	Alfian
9	Ahmad Sanusi	9	Abi Kusno Tjokrosjoso	9	Ali Alatas
10	Ahmad Subardjo Djoyodisuryo	10	Amir Syarifuddin	10	Ali Murtopo
11	Arief Frederik Lasut	11	Ajip Rosidi	11	Ali Sadikin
12	Armijn Pane	12	Andjar Asmara	12	Amien Rais
13	Albertus Soegijapranata SJ	13	A.A. Maramis	13	Amri Yahya
14	Alexius Impurung Mendur	14	Ahmad Husein	14	Andi Hakim Nasution
15	Ali Sastroamidjojo	15	Bung Tomo	15	Anton M. Muliono

1	2	3	4	5	6
16	Amir Hamzah	16	Basyrudin Motik	16	A.R. Soehoed
17	Bahder Johan	17	Burhanuddin Mohammad Diah	17	Bagong Kusudihardjo
18	Cipto Mangunkusumo	18	Chairil Anwar	18	Baharuddin J. Habiebie
19	Cornel Simanjuntak	19	Djamaluddin Adinegoro	19	Benyamin Sueb
20	Daeng Sutigna	20	Dick Hartoko	20	Benyamin Mangkudilaga
21	Dewi Sartika	21	Djoko Soetono	21	Bismar Siregar
22	Pangeran Diponegoro	22	Ferdinad Lumban Tobing	22	Bokir
23	EFE. Douwes Dekker	23	Frans Kaisepo	23	Bustanil Arifin
24	Gatot Mangkupradja	24	Fathurrahman Kafrawi	24	Cosmas Batubara
25	GK. Muhammad Daud Beureueh	25	G.A. Siwabesi	25	Ciputra
26	G.S.S.J. Sam	26	Hasjim Ning	26	Daoed Yoesoef
	Ratulangi				
27	Hasyim Asy'ari	27	Hamka	27	Deliar Noer
28	H.B. Jassin	28	Hamid Algadri	28	Dorojatun Koentjarajakti
29	H.R. Rasuna Said	29	Idham Kholid	29	Dwiki Dharmawan
30	Ida Bagus Ngurah	30	Iwan Simatupang	30	Edi Sudrajad
31	Ide Anak Agung Gde Agung	31	Jamaludin Malik	31	Edy Sediawati
32	Ignatius Joseph Kasimo	32	Johanes Leimina	32	Emil Salim
33	I Gusti Ketut Pudja	33	Juanda Kartawijaya	33	Fuad Hasan
34	Ismail Marzuki	34	Junus Jahya	34	Goenawan Muhammad
35	Iwa Kusuma Sumantri	35	Koentjaraningrat	35	Harmoko
36	Johannes Latuharhary	36	Liberty Manik	36	Harry Tjan Silalahi
37	Kartini	37	Lambertus Nicodamus Palar	37	Harun Nasution
38	Kasman Singodimedjo	38	Maria Ulfa Soebadio	38	Haryono Suyono

1	2	3	4	5	6
			Sastrosatomo		1
39	Dewamara	39	Maludin Simbolon	39	HAR. Tilaar
40	Ki Sarmidi Mangunsarkoro	40	Mohamad Ilyas Ruhiat	40	Herman Johannes
41	Kwee Hing Tjiat	41	Muhammad Daud Beureuh	41	Hoegeng Iman Santoso
42	Marah Rusli	42	Ma'shum Lasem	42	Ibnu Soetowo
43	Marius Ramis Dayoh	43	Mohamad Roem	43	Ichlasul Amal
44	Maria Walanda Maramis	44	Mochtar Lubi	44	Iwan Tirta
45	Mas Marco Kartodikoromo	45	M. Bondan	45	Jack Lesmana
46	Mas Mansur	46	M. Isa Ansary	46	Jacob Utama
47	Muhammad Husni Thamrin	47	M. Sadli	47	Jeno Harumbrojo
48	Muhammad Yamin	48	Masagung	48	Jusuf Kalla
49	Muwardi	49	Nicolaus Driyarkara	49	Kardinah Soepardjo R.
50	Mohammad Hatta	50	Nasaruddin Latief	50	Kemal Idris
51	Mohammad Misbach	51	Prawoto Mangnsaswito	51	Koesnadi Hardjasoemantri
52	Mohammad Natsir	52	Piet Zoelmoelder	52	Kuntowidjoyo
53	Mohammad Syafei	53	Petrus Kanisius Ojong	53	L.B. Moerdani
54	Oemar Said Cokroaminoto	54	R.J. Katamsi Martorohardjo	54	Mahar Mardjono
55	Oto Iskandardinata	55	Rosihan Anwar	55	Marie Muhammad
56	PA. Hoesin Djajadiningrat	56	R.E. Martadinata	56	Martha Tilaar
57	RM. Ngabehi Poerbatjakara	57	Rasjidi	57	Mochtar Kusumaatmadja
58	Radjiman Wediodiningrat	58	Ruslan Abdulgani	58	Muhammad Noer
59	Rahman Elyunusiyah	59	Soeharso	59	M. Yusuf
60	Raja Ali Haji	60	Soebadio Sastrosatomo	60	M. Panggabean

1	2	3	4	5	6
61	Roehanna Koedoes	61	Subagyo Sastrowardoyo	61	Mubyarto
62	Samanhudi	62	Subhan Z.E.	62	N.H. Dini
63	Sartono	63	Sarwono Prawirohardjo	63	Mooryati Sudibyo
64	Sanusi Pane	64	Soetedjo	64	Muhammad Imaduddin A.
65	Saemaun	65	Saifuddin Zuhri	65	Muhammad Kharis Soehoed
66	Soekarno	66	Sarino Mangunpranoto	66	Munawir Sadjali
67	Soenario	67	Sindudarsono Sudjojono	67	Nugroho Notosusanto
68	Sukatinah Sunarjo Mangunpuspito	68	Supeni	68	Nurcholis Madjid
69	Sukiman Wirjosandjojo	69	Sarbini Sumawinata	69	Nursyahbani K.
70	Sujatin Kartowijono	70	Sudirman	70	Nyoman Gunarsa
71	Prof. Mr. Dr. Supomo	71	Sumantri Brodjonegoro	71	Ong Hok Kam
72	Suratin	72	Saridjah Bintang Soedibjo	72	Padmosantjojo
73	Surastri Karma Trimurti	73	Soedjatmoko	73	Ramadhan KH.
74	RM. Suryopranoto	74	Sumanang	74	Rudy Hartono
75	Dr. Sutarjo Kartohadikusumo	<i>7</i> 5	Soemarno Sostroatmodjo	<i>7</i> 5	Sapto Hudoyo
76	Sutan Syahrir	76	Satrio	76	Sapardi Djoko Damono
77	Sutan Takdir Alisyahbana	77	Sitor Situmorang	77	Saparilah Sadli
78	Sutomo	78	Sukarni	78	Siti Hartinah Soeharto
79	Tan Malaka	79	Suwirjo	79	SM. Ardan
80	RM. Tirto Adisuryo	80	Sudiro	80	Soeharto
81	H. Usmar Ismail	81	Sri Sultan Hamengkubuwono IX	81	Soe Hok Gie
82	Dr. Wahidin Sudirohusodo	82	Soetomo Tjokronegoro	82	Soemitro

1	- 2	3	4	5	6
83	Wahid Hasyim	83	Slamet Iman Santoso	83	Soesilo Soedarman
84	Wage Rudolf Supratman	84	Sjafroeddin Prawiranegara	84	Sofian Wanandi
85	Yap Tjwin Bing	85	Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo	85	Supia Latifah A.
		86	Soedarpo Sastrosatomo	86	Teguh Karya
		87	Selo Soemardjan	87	Teguh Srimulat
		88	Sayuti Melik	88	Thayeb Gobel
		89	Sungkono	89	Timbul Hadiprayitno
		90	Sahardjo	90	Titik Puspa
		91	Sukardjo Wiryopranoto	91	Tuti Alawiyah
		92	Teuku M. Hasan	92	Uka Tjandrasasmita
		93	Tahi Bonar Simatupang	93	Umar Kayam
		94	TSG. Mulia	94	Waljinah
		95	Oerip Soemohardjo	95	Widjojo Nitisastro
		96	Wilopo	96	Wildan Yatim
		97	W.Z. Johanes	97	WS. Rendra
		98	W.J.S. Purwadaminta	98	Yap Thiam Hien
		99	Widjojo Nitisastro	99	Yusuf Bilyarta Mangunwijaya
		100	Yusuf Wibisono		

Tokoh-tokoh yang ditulis dalam buku sejarah pemikiran Indonesia merupakan tokoh-tokoh yang mempunyai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. Dengan ditulisnya pemikiran-pemikiran tokoh yang berpengaruh terhadap sejarah bangsa diharapkan generasi muda bisa meneladani dan mengembangkan pemikiran tokoh tersebut.

Dalam penulisan sejarah tidak terlepas dari keberadaan data sejarah sebagai sumber dalam penulisannya. Data sejarah perlu diinvetarisir untuk menjaring data yang selama ini belum terdata dengan baik, khususnya data sejarah lokal. Sebagai bentuk kepedulian untuk mendata sejarah lokal, Tahun 2008 Subdirektorat Historiografi memprogramkan kegiatan Inventarisasi Data Sejarah Lokal. Kegiatan ini perlu untuk menjaring data kesejarahan yang ada di perpustakaan daerah, universitas, BPSNT dan lainnya (lihat tabel 12)

TABEL 12
INVENTARISASI DATA SEJARAH LOKAL

NO	LOKASI PENGUMPULAN DATA/WAKTU PELAKSANAAN	KATEGORI NASKAH	INSTANSI PEMILIK DATA
1	2	3	4
1	Lampung 4-6 Juni 2008	Skripsi Buku Buku Buku	Universitas Lampung Perpustakaan Pribadi Perpustakaan Daerah Bandar Lampung Depdikbud Kanwil
2	Sumatera Barat 9-11 Juni 2008	Skripsi, Buku Buku Tesis	Lampung Universitas Negeri Padang BPSNT Padang Universitas Indonesia
3	Sumatera Selatan 21-23 Juli 2008	Buku Skripsi Tesis Artikel, Buku, dan Majalah Buku	Perpustakaan Masjid Agung Palembang IAIN Raden Patah IAIN Raden Patah Balai Arkeologi Palembang Gramedia Widiasarana Indonesia

Dari hasil pengumpulan data di tiga wilayah tersebut dapat disimpulkan bahwa data sejarah lokal jumlahnya masih terbatas. Mencermati hal ini perlu ada dukungan berbagai pihak baik dari pemangku kepentingan dan akademisi untuk mendorong motivasi penulisan sejarah lokal di daerah.

Tahun 2008, Subdirektorat Historiografi memprogramkan kegiatan Penulisan Sejarah dengan judul "Dari Bandar Dagang Menuju Kota Administrasi: Kasus Pariaman", judul ini dipilih sebagai implementasi dari kegiatan Sosialisasi Buku Pedoman Penulisan Sejarah Lokal yang dilakukan di Padang, Sumatera Barat. Hasil kegiatan ini adalah draft naskah siap cetak.

#### 2.4 Subdirektorat Pemahaman Sejarah

Subdirektorat Pemahaman Sejarah mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai sejarah sebagai bagian dari upaya pembangunan karakter dan jatidiri bangsa. Hingga saat ini Subdirektorat ini dipimpin oleh Amurwani DL,M.Hum. dibantu dua orang kepala seksi yaitu Kepala Seksi Sosialisasi Makna Sejarah M. Sanggupri Bochari, M.Hum. dan Kepala Seksi Internalisasi Pengajaran Sejarah Nujul Kristanto, S.Sos. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subdirektorat ini terlihat dalam tabel-tabel berikut ini.

# natek arrejet agg<mark>erdagar</mark> (**Tabek**ratik) da da karangar

## dent EAWATAN SEJARAH NASIONAL (EASENAS) 101861

بللني امالا	dian band and	16 dotts 6-1 for	ejarah pada din siswa, 2010.
NO	WAKTU	TEMPAT .	copentingan <b>AMah</b> retal dapat
1	2	3	g : Jaconem Azertza (
1	16-21 Agustus	Sulawesi	Pelayaran Makassar-Selayar,
4 77	2005	Selatan	Merajut Simpul simpul and a
district.	id sizotobil (	mulas lach	Maritim Perekat Bangsa
2	30 Juli-3	Bangka	Pangkalpinang Kota Pangkal
# Asia	Agustus 2006	Belitung	Kemenangan (1711) begun ta
311	43-19 Agustus	Sumatera	Peranan Masyarakat Sumatera
etite.	2007 Same Allerta Ali	Barat	Tengah dalam Menyelematkan NKRI: Pemerintah Darurat
27.6.4	(1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	- E. ioi mani	Republik Indonesia (PDRI) Surat Mata Rantai yang Hilang
14	10-14 Juli 2008	Bali	Puputan di/Bali
5	14-18 Agustus 2009	Sulawesi	Merajut Simpul-simpul Keindonesiaan di Bumi Nyiur
	-		Melambai

TABELIA.

Lawatan Sejarah Nasional atau disingkat LASENAS adalah suatu kegiatan perjalanan melawat situs-situs bersejarah (a trip to historical sites) yang merupakan simpul-simpul orientasi nilai-nilai perjuangan dan persatuan untuk memperkokoh integrasi bangsa. LASENAS pertama kali dilaksanakan di pulau Jawa bekerjasama dengan BPSNT Bandung dan BPSNT Yogyakarta. Embrio kegiatan ini dilakukan pertama kali pada tahun 2002 dalam bentuk Lawatan Sejarah Daerah (LASEDA), yang dilaksanakan secara bersama oleh BPSNT Banda Aceh, BPSNT Padang, dan BPSNT Tanjungpinang.

Sejak pelaksanaannya pertama kali hingga saat ini respon masyarakat begitu positif terhadap LASENAS. Salah satu indikatornya adalah semakin tinggi minat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan lawatan sejarah di tingkat regional atau daerah. Dengan kondisi demikian, pemahaman sejarah pada diri siswa, guru, masyarakat, dan para pemangku kepentingan di daerah dapat semakin meningkat.

LASENAS merupakan program kegiatan berkelanjutan dari tahun 2003 hingga 2013. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi dan guru-guru sejarah terbaik dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga diikuti oleh para pemangku kepentingan bidang kesejarahan. Dalam dua tahun terakhir ini, LASENAS juga diikuti oleh peserta mandiri. Peserta mandiri adalah peserta yang secara swadaya ikut serta dalam kegiatan ini. Jadi selain peserta yang dibiayai oleh DIPA Direktorat Nilai Sejarah, ada pula peserta mandiri. Untuk lebih jelasnya terlihat dalam tabel 14.

TABEL14
PESERTA LAWATAN SEJARAH NASIONAL



Peserta yang mengikuti LASENAS adalah peserta terbaik yang sebelumnya telah diseleksi melalui LASEDA yang dilaksanakan oleh sebelas (11) BPSNT di Indonesia. Kuota minimal dari masing-masing wilayah kerja BPSNT adalah seorang siswa dan seorang guru sejarah. Namun seiring waktu jumlah kuota terus bertambah seiring dengan pendanaan dan juga animo dari masing-masing BPSNT.

Dari tahun ke tahun jumlah peserta LASENAS mengalami peningkatan. Tabel 14 menunjukkan bahwa pada tahun 2007, jumlah peserta mengalami peningkatan cukup signifikan. LASENAS di Sumatera Barat tersebut mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam kegiatan tersebut dihadiri dua orang menteri sekaligus. Jero Wacik, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dan Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional pada waktu itu.

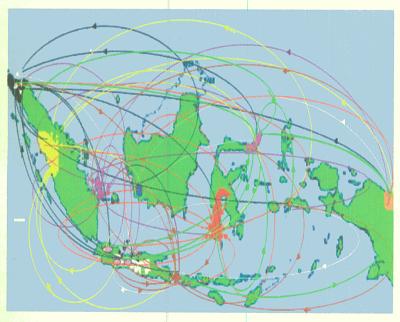
Tabel 14 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dan 2009 dihadiri peserta mandiri. Peserta mandiri ini tak hanya dari kalangan siswa dan guru, peserta mandiri datang dari kalangan pemangku kepentingan bidang kesejarahan antara lain Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan adanya peserta mandiri ini tampak bahwa antusiasme berbagai kalangan dalam upaya memahami nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa yang bertujuan memperkokoh integritas bangsa semakin menguat.

Kegiatan LASENAS tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Tercatat beberapa instansi yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini seperti yang tercantum dalam tabel 15.

a Lasenias 2000 (Salamost Indian)

Pelaksanaan LASENAS tahun 2005 hingga tahun 2009 telah memperlihatkan peta sebaran seperti yang terlihat pada peta 1.

PETA 1 SEBARAN PESERTA LASENAS







: Lasenas 2004 (Aceh)

: Lasenas 2005 (Sulawesi Selatan)

: Lasenas 2006 (Bangka Belitung)

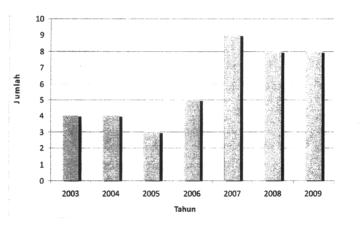
: Lasenas 2007 (Sumatera Barat)

: Lasenas 2008 (Bali)

: Lasenas 2009 (Sulawesi Utara)

Dalam peta ini memperlihatkan bahwa sebaran peserta LASENAS dari tahun 2003 hingga 2009 telah membentuk simpul-simpul yang merekatkan keindonesiaan. Simpul-simpul tersebut dapat diartikan bahwa peserta-peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan latar belakang adat dan budaya yang berbeda menyatu dalam kegiatan lawatan tersebut.

TABEL 15 JUMLAH INSTANSI PENDUKUNG LAWATAN SEJARAH NASIONAL



Dari tabel 15 dapat dilihat, bahwa dari segi kuantitas instansiinstansi yang mendukung kegiatan LASENAS mengalami pasang surut. Terlepas dari hal tersebut, Direktorat Nilai Sejarah selaku pengampu pelaksana kegiatan tak henti-hentinya untuk selalu memperluas jaringan sinergi untuk meningkatkan kualitas LASENAS ini.

Beberapa instansi yang melakukan sinergi program dengan LASENAS diantaranya: Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Wakil Presiden, Kementerian Kehutanan, BPSNT Seluruh Indonesia, BP3 Seluruh Indonesia, Pemerintah-Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan kegiatan, LSM-LSM peduli Sejarah, dan pihakpihak swasta seperti Majalah GADIS, PT. Lion, Sriwijaya Air.

Keberadaan instansi pendukung dalam kegiatan LASENAS semakin memperkaya aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Masing-masing instansi pendukung memberikan dukungan maksimal disetiap aktivitasnya. Misalnya dari Kementerian Dalam Negeri mendukung kegiatan ini melalui Dialog Kebangsaan, Kementerian Kehutanan yang memberikan bantuan bibit dalam aktivitas penanaman pohon Indonesia Peduli, hingga Majalah Gadis yang mempublikasikan kegiatan ini melalui majalahnya.

Subdirektorat Pemahaman Sejarah juga melaksanakan kegiatan Dialog Interaktif Kesejarahan sebagai upaya penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan khususnya bagi generasi muda. Dialog berlangsung sejak tahun 2007. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 16.

TABEL 16
DIALOG INTERAKTIF KESEJARAHAN

NO	TEMPAT/ TEMA	ТОРІК	PEMBICARA
1	2	3	4
1.	TVRI Jakarta,	Integrasi Bangsa: 100	Dirjen. Po tensi
	2007	Tahun Kebangkitan	Pertahanan,
	"Pemuda dan	Indonesia	Dephankam
	Makna		
	Kepahlawan"		Kepala Badan
			Depkominfo
2	A.Kupang, 15-17	A. Memaknai Kebangkitan	Prof. Dr.
	Mei 2008	Nasional untuk	Susanto Zuhdi
		Meningkatkan	
		Kesadaran Sejarah	
	"Menumbuhkan	B. Noemuti Pusat	Dr. Munandjar
	Pemahaman	Kedudukan Kase Metan	Widyatmika

1	2	3	4
	dan Kesadaran	di Timor pada Abad ke 17	
	Sejarah"	dan 18	
		A. Kebijakan dan Program	Drs. Shabri
		Kegiatan Direktorat	Aliaman
		Nilai Sejarah	
		B. Kebijakan dan Program	Drs. Endjat
		Kegiatan Direktorat	Djaenudrajat
	# M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M	Geografi Sejarah	
	A.Jakarta, 21 Mei	A. Pemuda Mahasiswa dan	Dr. Cosmas
	2008	Pembangunan Bangsa	Batubara
		B. Peranan Pemuda di	Dr. Anhar
	# <b>**** ** ** ** ** ** ** *</b>	dalam Sejarah	Gonggong
	"Kilas Balik Satu	Perjuangan Bangsa	
	Abad Gerakan	C. Refleksi Satu Abad	Dr. Muhklis
	Pemuda "	Kebangkitan Nasional	PaEni
	Indonesia"	D. Gerakan Perempuan	Dr. Magdalia
		Indonesia dalam Meraih	Alfian
		Emansipasi	
	B.Palembang, 17 -	A. Gerakan Pemuda di	Drs.
	19 Juni 2008	Sumsel dalam Merebut	Safruddin
	"Gerakan	Kemerdekaan B. Peranan Pemuda	Yusuf, M.Pd. Drs.
	Organisasi Pemuda di		
	Palembang	Sumsel dalam Merespon Munculnya	Suprayitno, M.Hum.
	dalam	Nasionalisme	Wi.IIuiii.
	Merespon	Kebangsaan	
	Munculnya	C. Nasionalisme Pemuda	Du Mumi
	Nasionalisme	C. Nasionalisme Pemuda Sumsel dalam	Dr. Murni, MA
	Kebangsaan"		WIA.
	Repairsbuair	Menentang Kolonialisme Belanda	
		1923-1942	
		D. Perjuangan Pemuda AK.	Dra. Yetti
		Gani dalam	Rahelly,
		Membangkitkan	M.Pd.
		Nasionalisme Rakyat di	21212 44
		Sumsel	
3	A.Medan 13-15	A. "Keinsyafan Sejarah"	Prof. Dr.
	November	dan Integrasi Bangsa	Susanto Zuhdi
	2009	B. Menggali Potensi Koleksi	Dr. Heriyanti
		Museum sebagai Bukti	
		Sejarah	

1 2	3	4
Meningkatkan Kesadaran sejarah untuk Mempertangguh	A. Museum Sebagai Pusat Informasi dan Penanaman Nilai Sejarah	Dr. Phil. Ichwan Azhari
Integrasi Bangsa"	B. Peranan Sumatera Utara dalam Revolusi Kemerdekaan	Dr. Fikarwin
A.Palu, 23-25 November 2009	A. Kesadaran dan Inte grasi Bangsa: Kemerdekaan di Tengah Globalisasi	Dr. Anhar Gonggong
"Meningkatkan Kesadaran	B. Menggali Tinggalan Purbakala sebagai Bukti Sejarah	Dr. Heriyanti
Sejarah untuk Mempertangguh Integrasi	C. Pluralisme Masyarakat Sulawesi Tengah dan Strategi Integrasi	Syakir Mahid, M.Hum.
Bangsa"	D. Integrasi dalam Sejarah Pasca Kolonial di Sulawesi Tengah	Haliadi Sadi, M.Hum.

Tabel 16 menunjukkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun telah dilaksanakan 6 (enam) kali Dialog Interaktif Kesejarahan. Dialog interaktif yang diikuti berbagai elemen masyarakat dari siswa dan guru SLTA, dosen dan mahasiswa, pemerhati sejarah, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dialog Interaktif Kesejarahan ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Selain jumlah peserta dialog yang meningkat, kegiatan ini juga diperkaya dengan aktivitas diluar diskusi dan dialog. Dialog Interaktif Kesejarahan yang bekerjasama dengan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara pada November 2009 diperkaya dengan aktivitas Lomba Resensi Koleksi Museum. Lomba diikuti oleh pelajar SLTA dari Kota Medan dan sekitarnya. Setelah sesi Dialog, sesi berikutnya adalah presentasi enam finalis yang terpilih dihadapan dewan juri untuk menentukan pemenang pertama hingga keenam. Kegiatan lomba semacam ini diharapkan dapat dilaksakan pada

kesempatan-kesempatan dialog berikutnya dan juga dapat diadopsi oleh museum-museum dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa melalui koleksi museum yang ada di daerahnya.

Sejarah bagi sebagian kalangan dianggap sebagai sesuatu yang kuno, jaman dulu dan pelajaran sejarahpun diberikan dengan monoton dan membosankan. Untuk mengemas sejarah supaya lebih menarik diperlukan media penyampaian sejarah yang bisa memberikan pengetahuan dengan cara baru. Cara baru itu melalui komik berlatar belakang sejarah. Komik sejarah merupakan alternatif pembelajaran sejarah diluar bangku pendidikan. Tahun 2006 Direktorat Nilai Sejarah mengadakan Sayembara Komik Sejarah seperti yang terlihat dalam tabel 17.

TABEL17 SAYEMBARA KOMIK SEJARAH TAHUN 2006 Tema: "Membangkitkan Nilai-nilai Kesejarahan pada Generasi Muda melalui Komik Sejarah"

NO	NAMA DAN ASAL PESERTA	JUDUL KOMIK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Amalia Nur Prihastuti (UNDIP- Semarang)	Pertempuran Pisangan 24 Juli 1825	Setelah melalui proses penjurian terpilih enam
2	Muh Ali Masyhar (UNIBRAW- Malang)	Seokarno dan Detik- Detik Proklamasi	naskah komik terbaik: 1. Aziza Noor
3	Nurfitriani Zakaria (SMAN 2 Depok)	Si Jalak Harupat	2. Robi Sulistio Didi
4	Muhamad Rajib H (Banten)	Soe Hok Gie	3. Amalia Nur P 4. Muh Ali M
5	Aziza Noor (ITB- Bandung)	Bendera	5. Nurfitriani Z 6. Hasan Sobari
6	Hasan Sobari	Diponegoro:	

1	2	3	4
	(Masyarakat Komik Indonesia)	Diponegoro: The Antawirya Stories	
7	Robi Sulistio Didi (UNAIR-Surabaya)	Tiga Pelaut dalam Sejarah Masuknya Islam di Jawa Timur	

Sejak pertama kali didirikan Direktorat Nilai Sejarah hingga saat ini, Sayembara Komik Sejarah baru dilaksanakan sekali yaitu pada tahun 2006. Lomba ini ditujukan untuk kalangan mahasiswa, SLTA, dan masyarakat umum. Munculnya sayembara ini adalah bentuk kepedulian akan kecintaan generasi muda terhadap komik-komik bertemakan sejarah yang semakin berkurang. Didorong atas keinginan menumbuhkembangkan kreativitas seni dan meningkatkan kesadaran sejarah, maka diadakanlah sayembara ini.

Pada masa pendaftaran tercatat 23 orang menjadi peserta, namun hingga batas waktu yang ditentukan hanya ada 7 naskah yang masuk, seperti yang tercantum dalam tabel 17. Memperhatikan begitu antusiasnya peserta dalam mengikuti sayembara ini, Direktorat Nilai sejarah berencana untuk mengadakan kegiatan sejenis pada tahun 2011 dan seterusnya dengan konsep yang lebih menarik lagi.

#### 2.2 Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi

Subdirektorat ini merupakan ujung tombak dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan semua aktivitas kesejarahan. Selama kurun waktu 2005-2009 subdirektorat ini pernah dipimpin oleh Drs. Andi Pattara, Drs. Purwadi, Hartono M Samrin, MM. Saat ini subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi dipimpin oleh Sri Suharni MM, dengan dibantu Drs. Sugiyanto sebagai kepala seksi Dokumentasi dan Sri Suhartanti, SH. sebagai kepala seksi Publikasi. Data hasil penerbitan Warta Sejarah oleh subdirektorat ini dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini.

TABEL 18
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KESEJARAHAN: PENERBITAN WARTA SEJARAH

NO	THN	EDISI	TEMA	JML
1	2	3	4	5
1	2005	Vol.4 No.5, Juni	-	-
2	2005	Vol.4 No 6, Desember	-	-
3	2006	Vol.5 No.7, Agustus	-	-
4	2006	Vol.5 No.8, Desember	Perjuangan Bangsa Indonesia dari tahun 1945	500 eksp.
5	2007	Vol.6 No.9, Juni	Menyongsong 100 tahun Kebangkitan Nasional	500 eksp.
6	2007	Vol.6 No.10, Desember	Pemuda dan Makna Kepahlawan	500 eksp.
7	2008	Vol.7 No.11, Juni	100 tahun Kebangkitan Indonesia	500 eksp.
8	2008	Vol. 7 No.12, Desember	Indonesia dalam Arus Demokrasi	500 eksp.
9	2009	Vol. 8 No.13, Juni	Pesta Demokrasi	500 eksp.
10	2009	Vol. 8 No.14, Desember	Demokrasi untuk Kemakmuran Bangsa	500 eksp.

Pada awalnya, penerbitan Warta Sejarah dimaksudkan sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Nilai Sejarah. Dalam perkembangannya Warta Sejarah dijadikan juga menjadi wadah publikasi tulisan-tulisan hasil penelitian peneliti di UPT BPSNT seluruh Indonesia. Tiap edisinya, Warta Sejarah memilih tema-tema yang disesuaikan dengan kondisi dan tema-tema yang mengemuka pada waktu tersebut. Dari terbitan ini kemudian didistribusikan ke jajaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, UPT-UPT terkait, Perguruan Tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Edisi perdana Warta Sejarah yaitu pada tahun 2002 (lihat tabel 18). Pada waktu itu penerbitan ini dilakukan oleh Direktorat Sejarah, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Meskipun mengalami perubahan struktural, namun penerbitan Warta Sejarah terus dilakukan hingga sekarang. Dalam tabel juga terlihat bahwa Warta Sejarah Volume 2 hingga Volume 5 data tidak tersedia.

TABEL 19 PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	2005	-	Data tidak ada
2	2006	40 judul	
3	2007	38 judul	
4	2008	182 judul	
5	2009	64 judul	

Perpustakaan Direktorat Nilai Sejarah dibentuk untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Nilai Sejarah. Koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan ini cukup beragam, namun didominasi dengan koleksi-koleksi kesejarahan. Koleksi yang berada di perpustakaan ini diantaranya berupa hasil terbitan Kesejarahan pada waktu unit kerja ini masih bergabung dengan Kementerian Pendidikan Nasional di bawah Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah (IDSN) . Selain mengoleksi terbitan-terbitan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, perpustakaan ini juga mengadakan pembelian sejumlah buku untuk menambah koleksinya (tabel 19). Koleksi-koleksi baru bersifat umum untuk memperkaya khasanah koleksi-koleksi sejarah yang telah dimiliki. Perpustakaan Direktorat Nilai Sejarah menjadi rujukan para mahasiswa, peneliti, dan pihak-pihak berkepentingan yang mencari sumber sejarah. Untuk itulah perpustakaan ini juga memberikan fasilitas pinjaman buku.

Upaya pembenahan pengelolaan perpustakaan dilakukan tiap tahun. Registrasi inventarisasi, dan katalogisasi koleksi perpustakaan terus dilakukan sepanjang tahun. Hal ini terkait dengan upaya penyusunan database koleksi perpustakaan yang nantinya akan mempermudah pengguna perpustakaan dalam mencari dan mengakses koleksi.

Perpustakaan Direktorat Nilai Sejarah juga menyimpan koleksi kliping koran dan bundel majalah. Kliping koran diklasifikasi berdasarkan 5 (lima) tema yang telah ditentukan yaitu: Pertama; Biografi Tokoh dan Peristiwa Daerah, dibagi atas nasional, regional, lokal, dan maritim. Kedua; Sejarah Politik,

dibagi atas pertahanan keamanan, demokrasi, dan otonomi daerah. Ketiga; Sejarah Sosial Budaya; dibagi atas bangunan sejarah, agama, dan peristiwa budaya. Keempat; Sejarah Ekonomi, meliputi segala peristiwa ekonomi yang mengandung nilai sejarah. Kelima; semua kegiatan yang berkaitan dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan bencana alam berskala nasional.

TABEL20
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KESEJARAHAN:
OKUMENTASI, SUMBER TERTULIS KONTEMI

# DOKUMENTASI SUMBER TERTULIS KONTEMPORER (KLIPING KORAN)

NO	THN	TEMA/JML LEMBAR				DAT
		ТОКОН	POLITIK	SOSIAL	EKONOMI	JML
1	2	3	4	5	6	7
1	2005	-	-	-	-	-
2	2006	-	-	-		-
3	2007	300	3300	350	200	4150
4	2008	250	3441	300	200	4191
5	2009	•	-	-	•	-

Selain berbagai aktivitas di atas, Pengembangan Sistem Informasi Kesejarahan juga melaksanakan "Dokumentasi Sumber Tertulis Kontemporer" berupa kliping koran. Direktorat Nilai Sejarah sesuai dengan anggaran, berlangganan tiga buah Koran yaitu Kompas, Republika, dan Media Indonesia. Dari koran-koran tersebut dipilih berita-berita sesuai dengan tema yang telah ditetapkan untuk dikliping. Tiap akhir tahun anggaran, kliping tersebut dibundel sesuai dengan klasifikasi kliping.

TABEL 21
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KESEJARAHAN:

# DOKUMENTASI SUMBER TERTULIS KONTEMPORER (BUNDEL MAJALAH)

NO	TAHUN	NAMA I	KET		
		TEMPO	GATRA	DLL	· 新华里蒙蒙
1	2	3	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5	6
1	2005	-	-	-	Tidak ada
2	2006	-	-	-	s.d.a.
3	2007	12	12	-	-
4	2008	12	12	-	-
5	2009	-	-	-	Tidak ada

Selain mengkliping koran, Direktorat Nilai Sejarah juga melakukan bundel majalah. Berlangganan majalah dilakukan sejak tahun 2007. Tterpilih dua buah majalah yaitu Tempo dan Gatra. Kliping koran dan bundel majalah ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah kontemporer dan masyarakat dapat membaca dan meng-copy-nya pada perpustakaan Direktorat Nilai Sejarah.

Untuk menyebarluaskan informasi tempat-tempat bersejarah kepada masyarakat umum, Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi melaksanakan aktivitas Publikasi Kesejarahan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 22 berikut.

## TABEL 22

## PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEJARAHAN:

### PUBLIKASI KESEJARAHAN

NO	THN	LOKASI	TEMA	MEDIA PEMPUT
1	2	3	4	5
1	2008	Jawa	Tinggalan Sejarah dan	TVRI
		Barat	Kesadaran Sejarah	TPI
		13-16	Tantangan Masa Depan	Republika
		Oktober		Travel Club
		2008		Media
				Indonesia
2	2009	Aceh	Menelusuri Jejak	TVRI
		23-27 Juni	Masjid dan Peninggalan	Aceh TV
		2009	Sejarah di Serambi	Waspada
			Mekah	Metro TV
				Media
				Indonesia
				Travelplus
				Indonesia
				Serambi
				Kompas
		Madura	Menelusuri Jejak	TVRI
			Peninggalan Sejarah di	JTV Surabaya
			Pulau Madura	Madura
				Channel

Dalam aktivitas ini, wartawan media cerak dan elektronik meliput keberadaan warisan-warisan sejarah yang tersebar di seluruh Indonesia dan menginformasikannya kepada masyarakat. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Terlihat pada tabel 22 bahwa keikutsertaan media yang mempublikasikannya bertambah dari tahun ke tahun.

TABEL 23
PAMERAN KESEJARAHAN

NO	PELAKSANAAN	TEMPAT	TEMA	JML PENGUNJUNG
1	2	3	4	5
1	Mei 2008	Museum Kebangkitan Nasional- Jakarta	Pameran Kesejarahan dalam Rangka 100 tahun Kebangkitan Nasional	1105 org
2	Juli 2008	Monumen Perjuangan Bajra Sandi- Denpasar	Melalui Puputan Wujudkan Nasionalisme	576 org
3	Desember 2008	Gedung Sapta Pesona- Jakarta	Pameran Akhir Tahun Kementerian Budpar	527 org
4	Desember 2009	Gedung Sapta Pesona- Jakarta	Pameran Akhir Tahun Kementerian Budpar	-

Pameran Kesejarahan yang dilakukan oleh Direktorat Nilai Sejarah bersifat tematis. Pameran ini dilaksanakan dalam bentuk pameran bersama dengan instansi terkait lain. Direktorat Nilai Sejarah menampilkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran, selain itu dipamerkan pula foto-foto pahlawan nasional beserta deskripsinya, buku-buku kesejarahan terbitan Direktorat Nilai Sejarah. Pameran rutin tahunan yang diadakan tiap akhir tahun oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi agenda wajib yang selalu diikuti oleh Direktorat Nilai Sejarah. Jumlah pengunjung menjadi tolak ukur dalam kesuksesan sebuah pameran. Dari tabel 23 terlihat bahwa jumlah pengunjung dari satu pameran ke pameran yang lain

cukup bervariasi, tergantung dari tema dan tempat penyelenggaraan pameran kesejarahan.

TABEL 24
PENERBITAN DAN PENCETAKAN BUKU

NO	TAHUN	JUDUL BUKU	PENULIS
1	2	3	4
1	2006	Penulisan Sejarah Lokal	David Dymond
		Sebuah Pedoman Praktis	Dr. Nana
		(Writing Local History A	Nurliana
		Practical Guide) (terj.)	Soeyono, MA
			(Penyadur)
2	2006	Bunga Rampai Sejarah Lokal:	Abdul Hasyim
		Kerawanan Sosial dalam	Ghani dkk
		Perspektif Sejarah	
3	2006	Laju Palari di Biru Bahari	
		(komik)	
4	2006	Merangkai Kebersamaan	
		(komik)	
5	2006	Komik Sejarah	
		(enam karya terbaik lomba	
		komik sejarah 2006)	

Dari tabel 24 menunjukkan data penerbitan dan pencetakan buku pada tahun 2006. Direktorat Nilai Sejarah juga melakukan pencetakan ulang atas buku-buku kesejarahan. Pencetakan ulang ini dikarenakan jumlah eksemplar buku yang ada di perpustakaan direktorat jumlahnya semakin sedikit, dan permintaan atas buku tersebut meningkat.

Selain aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh masingmasing subdirektorat, dalam periode RPJMN I (2005-2009) Direktorat Nilai Sejarah juga melaksanakan aktivitas yaitu Diskusi Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah dan Konferensi Nasional Sejarah VIII. Diskusi Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah ini dilaksanakan pada tanggal 6-9 November 2006 di Yogyakarta. Penyelenggaraan diskusi dimaksudkan sebagai kepedulian atas dinamika pelaksanaan otonomi daerah dari perspektif sejarah. Hasil-hasil diskusi ini meliputi:

### Rumusan:

- Kondisi geografis Indonesia rawan bencana, tetapi apabila dikelola dengan baik mempunyai potensi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Kenyataan menunjukkan bahwa bencana alam di Indonesia telah sering terjadi sejak dahulu.
- c. Masyarakat belum siap menghadapi bencana alam.
- Masyarakat belum diberi pengetahuan yang aplikatif tentang bencana alam.
- e. Belum ada sistem sosialisasi yang tepat tentang pengetahuan bencana alam

### Rekomendasi:

- a. Perlu disusun buku tentang kondisi geografis Indonesia yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
- b. Perlu disusun buku Sejarah Bencana Alam di Indonesia.
- c. Perlu ditingkatkan peranan Pemerintah Daerah sesuai jiwa Otonomi Daerah untuk mendorong masuknya masalah bencana alam dalam muatan lokal pendidikan.
- d. Perlu menjalin kerjasama yang lebih luas dengan berbagai kalangan untuk membangun budaya siaga bencana alam.

Tim perumus terdiri atas Prof. Dr. Soehartono (Ketua), Dr. Magdalia Alfian, Dr. Radmopurbo, Kasijanto, M.Hum., Iskandar, M.Hum. masing-masing sebagai anggota.

Pada tanggal 13-16 November 2006 di Hotel Millenium Jakarta dilaksanakan Konferensi Nasional Sejarah VIII. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi yang menjadi agenda lima tahunan para sejarahwan yang terhimpun dalam Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Konferensi Nasional Sejarah VIII dengan tema "Tepian Ruang dan Waktu: Tantangan Sejarah" pembukaannya dilaksanakan di Auditorium Istana Wakil Presiden RI, dibuka secara resmi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Dihadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, 99 orang pembicara, 150 peserta konferensi, dan undangan lainnya.

Dalam konferensi, selain dilaksanakan presentasi makalah dari masing-masing pemakalah dan diskusi juga dilaksanakan peluncuran buku (soft launching) Indonesia dalam Arus Sejarah (IdAS) yang diterbitkan dalam sembilan jilid. Bertindak selaku editor umum adalah Prof. Dr. Taufik Abdullah. Buku ini bukan dimaksudkan untuk mengganti atau merevisi buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang terdiri dari enam jilid, namun buku IdAS lebih bersifat melengkapi buku-buku sejarah yang telah terbit sebelumnya.

Sebagai rangkaian dari Konferensi adalah Kongres Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dengan agenda antara lain pemberian gelar anggota kehormatan MSI, laporan pertanggungjawaban Ketua Umum dan pemilihan Ketua Umum MSI periode berikutnya. Pada kongres ni terpilih Dr. Muhklis PaEni sebagai Ketua Umum MSI periode 2006-2011 menggantikan Prof. Dr. Taufik Abdullah.

Tabel 25 memperlihatkan beragam sub tema yang dibahas pada Konferensi Sejarah Nasional VIII

TABEL 25 SUB TEMA YANG DIBAHAS DALAM KONFERENSI NASIONAL SEJARAH VIII

NO	SUB TEMA		
1	2		
1	Teori, Pendekatan, dan Metodologi		
2	Pendidikan Sejarah: Orientasi Ideologi dan Strategis		
	Paedagogik		
3	Peninggalan Sejarah dan Kesadaran Sejarah		
4	Dari Lembaran Sejarah Pemikiran (Politik, Ekonomi,		
	Kebudayaan, Agama, dan sebagainya)		
5	Sastra Imajinasi Literer, Realitas, Sosial, dan Rekaman Sejarah		
6	Saat Menentukan dalam Sejarah (Lokal atau Regional)		
7	Gender dan Dinamika Sejarah		
8	Perbatasan dalam Pemikiran/Sikap Kultural Keputusan Politik		
	dan Letupan Peristiwa		
9	Kota dan Dinamika Kebudayaan		
10	Vigilante/ Kriminalitas		
11	Laut, Sungai, dan Perkembangan Peradaban		
12	Pusat, Daerah Perbenturan Politik dan Ekonomi		
13	Nasionalisme dan Perkembangan Ekonomi		
14	Agama, Reformasi Sosial, dan Radikalisme Politik		
15	Migrasi, Tenaga Kerja, dan Proses Globalisasi		
16	Kesenian Sebagai Pantulan Perubahan Sosial		
17	Sidang Khusus: Pengalaman dan Peristiwa dalam Ingatan		

Dari Konferensi Nasional Sejarah VIII diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Konfererensi Nasional Sejarah yang akan datang di samping mencari tema baru sebaiknya melanjutkan pembicaraan tentang hal-hal yang sekarang telah memberikan tanda-tanda yang menjanjikan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan sejarah dan juga yang penting dalam memahami dinamika dan gejolak masyarakat saat kini.
- 2. Apapun tema Konferensi Nasional Sejarah yang akan datang masalah teori dan metodologi kesejarahan serta pendidikan sejarah sebaiknya selalu dibicarakan, hal ini diperlukan bagi peningkatan profesionalisme kesejarahan dan peningkatan mutu pendidikan sejarah.
- 3. Demikian juga halnya dengan sub tema "Pengalaman dalam Ingatan", karena subtema ini bukan saja mendekatkan pengetahuan sejarah pada aktor yang bermain di atas pentas sejarah, tetapi juga bahkan lebih penting memungkinkan kita menangkap nafas sejarah yang otentik.
- 4. Buku "Indonesia dalam Arus Sejarah" diharapkan selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Konferensi Nasional Sejarah VIII diharapkan agar peluncuran buku sejarah Indonesia yang komprehensif ini dapat dilakukan suatu pertemuan nasional kesejarahan pada tahun 2007, ketika kita memperingati ulang tahun ke 50 "Seminar Sejarah Nasional Tahun 1957".
- 5. Konferensi Nasional Sejarah mengharapkan agar Departemen Kebudayaan dan Pariwisata melanjutkan bantuannya pada penulisan dan menerbitkan buku sejarah yang 9 jilid ini. Disamping itu Konferensi Nasional Sejarah

- mengharapkan agar Departemen Pendidikan Nasional dapat membagikan buku ini ke semua sekolah menengah dan universitas-universitas di Indonesia.
- 6. Kerjasama yang telah berjalan dengan baik antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia dalam pelaksanaan pertemuan kesejarahan selalu dapat dilaksanakan dengan baik.
- 7. Dalam menghadapi kegalauan kesejarahan yang menghinggapi sebagian besar masyarakat kita Konferensi Nasional Sejarah mengharapkan agar para sejarawan dapat memberikan kepada masyarakat kejernihan berpikir kesejarahan dan kearifan sejarah.

Salah satu Program Kesejarahan yang memakan waktu cukup panjang adalah penulisan Buku Indonesia dalam Arus Sejarah (IdAS). Buku terdiri dari sembilan jilid ini ditulis oleh ahli-ahli dibidangnya. Sebelum dilakukannya penulisan ini diadakan sosialisasi terlebih dahulu tentang penulisan IdAS. Peluncuran perdana IdAS sudah dilaksanakan pada tahun 2006 dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII, meskipun penulisan buku ini masih dalam tahap penyelesaian. Tahun 2009 penulisan IdAS telah selesai. Ada sembilan jilid. Jilid pertama: Prasejarah; Jilid kedua: Kerajaan Hindu-Budha; Jilid ketiga: Kedatangan dan Peradaban Islam; Jilid keempat: Kolonisasi dan Peradaban; Jilid kelima: Masa Pergerakan Kebangsaan; Jilid keenam: Perang dan Revolusi; Jilid ketujuh: Pascarevolusi; Jilid kedelapan: Orde Baru dan Reformasi, dan Jilid kesembilan: Indeks dan Faktaneka. Sesuai rencana buku ini akan diluncurkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

# BAB 3 PENUTUP

Dari data yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, masih terdapat data yang tidak lengkap. Namun demikian, berdasarkan data yang telah ada, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai dasar dalam penetapan kebijakan pada tahun berikutnya. Adapun rangkaian kegiatan Direktorat Nilai Sejarah dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman sejarah adalah :

- Telah selesainya buku "Indonesia dalam Arus Sejarah (IdAS) sebanyak 9 jilid, dan dalam waktu dekat akan diluncurkan.
- 2. Pelajar dan Mahasiswa Indonesia memiliki kesempatan yang terbuka untuk mengikuti lomba kesejarahan, antara lain Lomba Karya Tulis dan Lomba Karya Komik Sejarah.
- Kerjasama dengan pemangku kepentingan dan pemerhati sejarah di daerah, untuk mengikuti kegiatan "Sosialisasi Pedoman Penulisan Sejarah Lokal. Dengan kegiatan ini Direktorat Nilai Sejarah berupaya menggalakkan kecintaan masyarakat untuk menulis sejarah lokal.
- 4. Guru-guru sejarah mendapat perhatian melalui kegiatan Workshop Kesejarahan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Direktorat Nilai Sejarah bahwa siswa kurang berminat untuk mempelajari sejarah bangsanya. Adanya kegiatan ini untuk membangkitkan semangat para guru

- sejarah lebih terpacu mempersiapkan diri dalam menyampaikan materi kesejarahan di kelas dan luar kelas.
- 5. Untuk lebih memahami dan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, para siswa dan guru-guru sejarah, diikutsertakan dalam kegiatan Lawatan Sejarah Nasional (LASENAS). Melalui lawatan ke obyek-obyek Sejarah yang mempunyai nilai-nilai simpul perekat keindonesiaan, sehingga generasi muda semakin mencintai bangsanya karena mengenal lebih mendalam latar belakang sejarah budaya terbentuknya bangsa Indonesia.
- 6. Peningkatan pemahaman nila-nilai kesejarahan juga disajikan kepada masyarakat luas, melalui Kegiatan Dialog Interaktif Kesejarahan yang dapat ditonton di televisi, dibaca di koran dan didengarkan melalui diskusi-diskusi. Kegiatan ini menampilkan narasumber yaitu para pakar untuk menyampaikan nilai-nilai kesejarahan.
- 7. Informasi kesejarahan dapat diperoleh dengan cara menuliskan dan menjadikan buku bacaan. Kegiatan penulisan sejarah selama lima tahun (2005-2009) telah menghasilkan beberapa buku bacaan yang telah disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat dibaca masyarakat pada perpustakaan di daerah, kantor BPSNT se-Indonesia, kantor pemerintahan lainnya, dan organisasi profesi bidang sejarah.
- 8. Selain buku, sebagai media pembelajaran, sumber bacaan dan untuk mendalami kesejarahan generasi muda dapat menonton VCD maupun DVD yang tersedia dan disebarluaskan ke berbagai sekolah, perpustakaan, kantor pemerintah lainnya, dan organisasi profesi bidang sejarah.

- 9. Pemahaman nilai-nilai kesejarahan bagi generasi muda dan masyarakat luas dilakukan dengan memperkenalkan kepada masyarakat tempat-tempat bersejarah melalui kegiatan Publikasi Kesejarahan yang diikuti wartawan media cetak dan elektronik. Keikutsertan berbagai media akan lebih mempercepat dan mempermudah bagi masyarakat untuk mengaksesnya yang telah tersedia di website Direktorat Nilai Sejarah. Data-data kesejarahan dapat juga diperoleh di perpustakaan Direktorat Nilai Sejarah. Di perpustakaan tersedia berbagai buku yang berhubungan dengan kesejarahan, termasuk didalamnya buku-buku hasil terbitan Direktorat Nilai Sejarah, dan data-data kesejarahan seperti klipping koran dan Warta Sejarah.
- 10. Peranan Tata Usaha, yang menangani administrasi kepegawaian tidak kalah pentingnya untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan. Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha diumpamakan seperti urat nadi dalam tubuh Direktorat Nilai Sejarah, sehingga Tata Usaha perlu mendapat perhatian dan penataan yang baik demi kelancaran tugas-tugas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Nunus Supardi, dkk. Sejarah Perkembangan Kebudayaan dalam Pemerintahan dan Dinamikanya. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Proyek Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya), Jakarta, 2004.
- Kebijakan Teknis Operasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Jarahnitra, Jakarta 1998.
- Lembar Informasi (Nomor 8 Tahun VIII/2001). Dinamika Integrasi, Direktorat Sejarah, Subdit Dokumentasi dan Publikasi, Jakarta, 2001.
- Memori Direktur Ditjarahnitra Dr. Anhar Gonggong Periode 1993 s.d 2000. Direktorat jenderal Kebudayaan, Depdiknas, 2001.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 17 tahun 2005 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.
- Progress Report Lawatan Sejarah Nasional 2003-2007. Direktorat Nilai Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Depbudpar. 2008.
- Warta Sejarah, Volume 1 No. 1 Desember 2002. BP BUDPAR, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Direktorat Sejarah, Jakarta, 2002.
- Warta Sejarah, Volume 5 No. 8 Desember 2006. Kemenbudpar, Dirjen. Sejarah dan Pubakala, Direktorat Nilai Sejarah, Jakarta, 2006.

- Warta Sejarah, Volume 6 No. 9 Juni 2007. Kemenbudpar, Dirjen. Sejarah dan Pubakala, Direktorat Nilai Sejarah, Jakarta, 2007.
- Warta Sejarah, Volume 6 No. 10 Desember 2007. Kemenbudpar, Dirjen. Sejarah dan Pubakala, Direktorat Nilai Sejarah, Jakarta, 2007.
- Warta Sejarah, Volume 7 No. 11 Juni 2008. Kemenbudpar, Dirjen. Sejarah dan Pubakala, Direktorat Nilai Sejarah, Jakarta, 2008.
- Warta Sejarah, Volume 7 No. 12 Desember 2008. Kemenbudpar, Dirjen. Sejarah dan Pubakala, Direktorat Nilai Sejarah, Jakarta, 2008.
- Warta Sejarah, Volume 8 No. 13 Juni 2009. Kemenbudpar, Dirjen. Sejarah dan Pubakala, Direktorat Nilai Sejarah, Jakarta, 2009.
- Warta Sejarah, Volume 8 No. 14 Desember 2009. Kemenbudpar, Dirjen. Sejarah dan Pubakala, Direktorat Nilai Sejarah, Jakarta, 2009.



Direktorat Nilai Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Komplek Kemdiknas Gedung E Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270 Telp./ Fax : (021) 5725519

Email: nilaisejarah\_budpar@yahoo.co.id, Website:www.nilaisejarah.budpar.go.id